



IMPLEMENTASI SAKIP DAN RB

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo





IMPLEMENTASI Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Reformasi Birokrasi

KABUPATEN SIDOARJO

Sistematika Paparan

1

Komitmen Peningkatan Implementasi SAKIP di Tahun 2020

2

RPJMD, Pohon Kinerja dan Proses Bisnis

3

Keselarasan Kinerja Organisasi dan Individu

4

Peningkatan Manajemen Kinerja Daerah

5

Peningkatan Implementasi SAKIP OPD

7

Penanganan Covid-19

8

Implementasi Reformasi Birokrasi

Komitmen Peningkatan Implementasi SAKIP Tahun 2020



REKOMENDASI TAHUN 2019

- Penerapan Performance Based Organization
- Penyempurnaan Peta Proses Bisnis
- Keselarasan kinerja organisasi dengan kinerja individu
- Menyempurnakan sistem pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja
- Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal / SPIP
- Menyempurnakan Aplikasi Manajemen Kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
- Meningkatkan kualitas evaluasi Program dan Kegiatan
- Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja OPD

TINDAK LANJUT TAHUN 2020



- Perubahan Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi berbasis kinerja pada OPD
- Menyempurnakan Aplikasi e-Kinerja sebagai sistem pengukuran kinerja individu
- Menyusun Analisa Resiko hingga level Kegiatan
- Pengembangan aplikasi e-Kenda untuk pengendalian pelaksanaan Program kegiatan
- Optimalisasi aplikasi e-Monev untuk Evaluasi Program Kegiatan
- Pendampingan dan Asistensi untuk OPD yang nilai SAKIP masih dibawah rata-rata / masih Nilai 'B'
- Pemberian reward untuk OPD dengan Nilai SAKIP 'A' dan OPD berpredikat ZI WBK / WBBM



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Komitmen Peningkatan Implementasi SAKIP Tahun 2020



REKOMENDASI PRA EVALUASI SAKIP TAHUN 2020

Pra Evaluasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020



NEWS

PRA EVALUASI SAKIP KABUPATEN SIDAARJO
TAHUN 2020

Telah Dilaksanakan Pra Evaluasi SAKIP
Hari, Rabu
Tanggal, 29 Juli 2020
Tempat, Pendopo Delta Wibawa

REKOMENDASI

Penyusunan Pohon Kinerja
sebagai aksi perbaikan
implementasi SAKIP



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo



VISI KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN

5

MISI

01

KELEMBAGAAN

Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

02

PEREKONOMIAN

Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat

03

PENDIDIKAN & KESEHATAN

Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan Pendidikan dan kesehatan

04

TATANAN SOSIAL

Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlaqul Karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban

05

INFRASTRUKTUR & LINGKUNGAN

Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.



Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Sidoarjo



Akses Strategis, dekat Bandara Internasional Juanda

Luas Wilayah terkecil, Jumlah Penduduk Terpadat

Berbatasan Langsung dengan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur

Pertumbuhan Industri dan Pengembangan UMKM sangat pesat

Sekitar 30% Penduduk Berprofesi Sebagai Wirausaha / Karyawan Swasta

Komposisi penggunaan lahan lebih banyak untuk Kawasan Perumahan, Permukiman, Industri dan Perdagangan dari pada untuk Lahan Pertanian

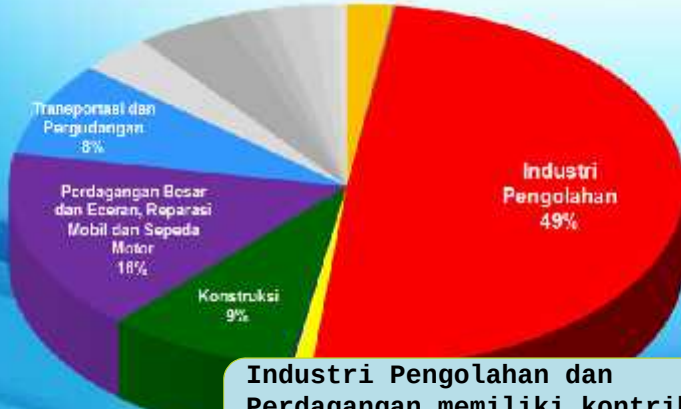


Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Kondisi Perekonomian



SHARE PDRB ADHK TAHUN 2019



Industri Pengolahan dan Perdagangan memiliki kontribusi tertinggi, yang didalamnya termasuk usaha mikro

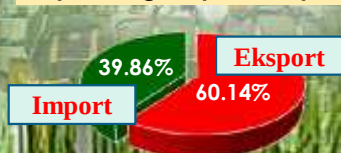
Usaha Mikro 207.184 Usaha Jumlah Industri 16.966 Industri



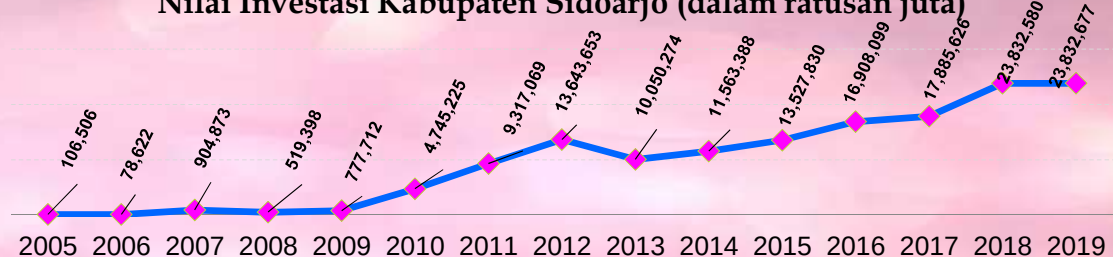
Ekonomi Kreatif 76 Komunitas



Daya Saing Ekspor - Import



Nilai Investasi Kabupaten Sidoarjo (dalam ratusan juta)



Opini BPK Atas Laporan Keuangan

No	Tahun	Opini
1	2010	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3	2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4	2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6	2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
8	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
9	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
10	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2010	Rp 356.161.848.548,24
2011	Rp 484.313.737.307,27
2012	Rp 669.617.556.904,41
2013	Rp 858.433.670.217,95
2014	Rp 1.115.332.938.500,16
2015	Rp 1.266.786.627.409,24
2016	Rp 1.335.283.958.792,70
2017	Rp 1.671.806.819.696,53
2018	Rp 1.685.558.666.147,01
2019	Rp 1.689.953.213.262,69

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo



Prioritas Pembangunan Daerah



2 **WAJIB**
**PENDIDIKAN
KESEHATAN**

3 **UNGGULAN**
**INDUSTRI
PERDAGANGAN
UMKM**

PENUNJANG

6 **INFRASTRUKTUR
LINGKUNGAN HIDUP
KESEJAHTERAAN SOSIAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PELAYANAN PUBLIK
REFORMASI BIROKRASI**



Sejahtera

Mandiri

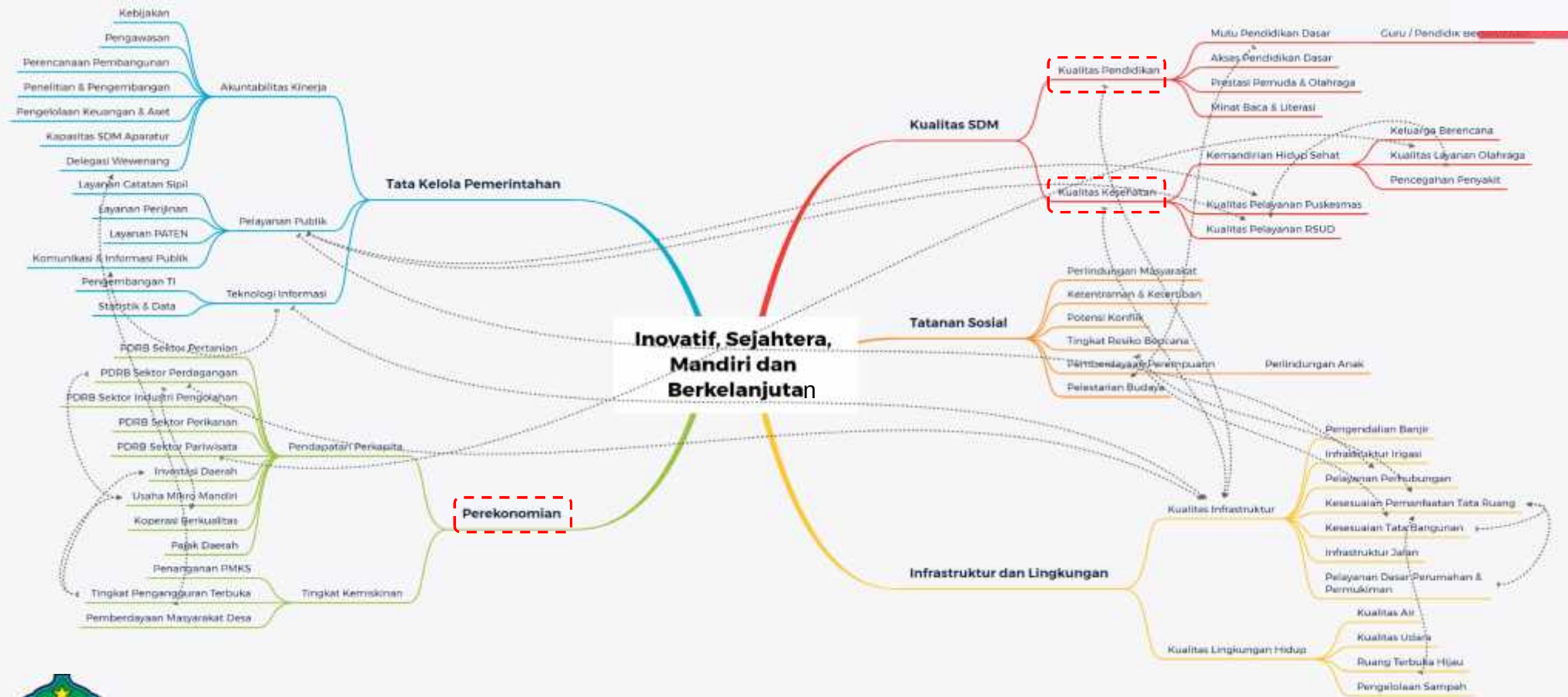
Berkelanjutan



Inovatif



Kerangka Logis Kinerja (Kausalitas Loop)



PROSES BISNIS Pecapaian Visi Misi

Level
0



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PROSES
MANAJEMEN

PROSES UTAMA

PROSES
PENDUKUNG

TATA KELOLA PEMERINTAHAN 1

AKUNTABILITAS KINERJA

PELAYANAN PUBLIK & PEMANFAATAN IT

PERENCANAAN

PENGENDALIAN
& PENGAWASAN

PENGELOLAAN
KEUANGAN &
ASET

KEBIJAKAN

PROFESIONA
LISME ASN

KUALITAS
PELAYANAN

PENGEMBANGAN IT

INFORMASI
PUBLIK

PEREKONOMIAN 2

PENINGKATAN PENDAPATAN
PERKAPITA

PENURUNAN
PENGANGGURAN
TERBUKA

PENGURANGAN
KEMISKINAN

MENURUNNYA
KETIMPANGAN
PENDAPATAN

KUALITAS SDM 3

KUALITAS PENDIDIKAN

KUALITAS KESEHATAN

TATANAN SOSIAL 4

KEAMANAN dan
KETERTIBAN

PENANGGULANGAN
BENCANA

PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN 5

KUANTITAS dan KUALITAS INFRASTRUKTUR

KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

VISI :
KABUPATEN SIDOARJO YANG
INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI,
DAN BERKELANJUTAN



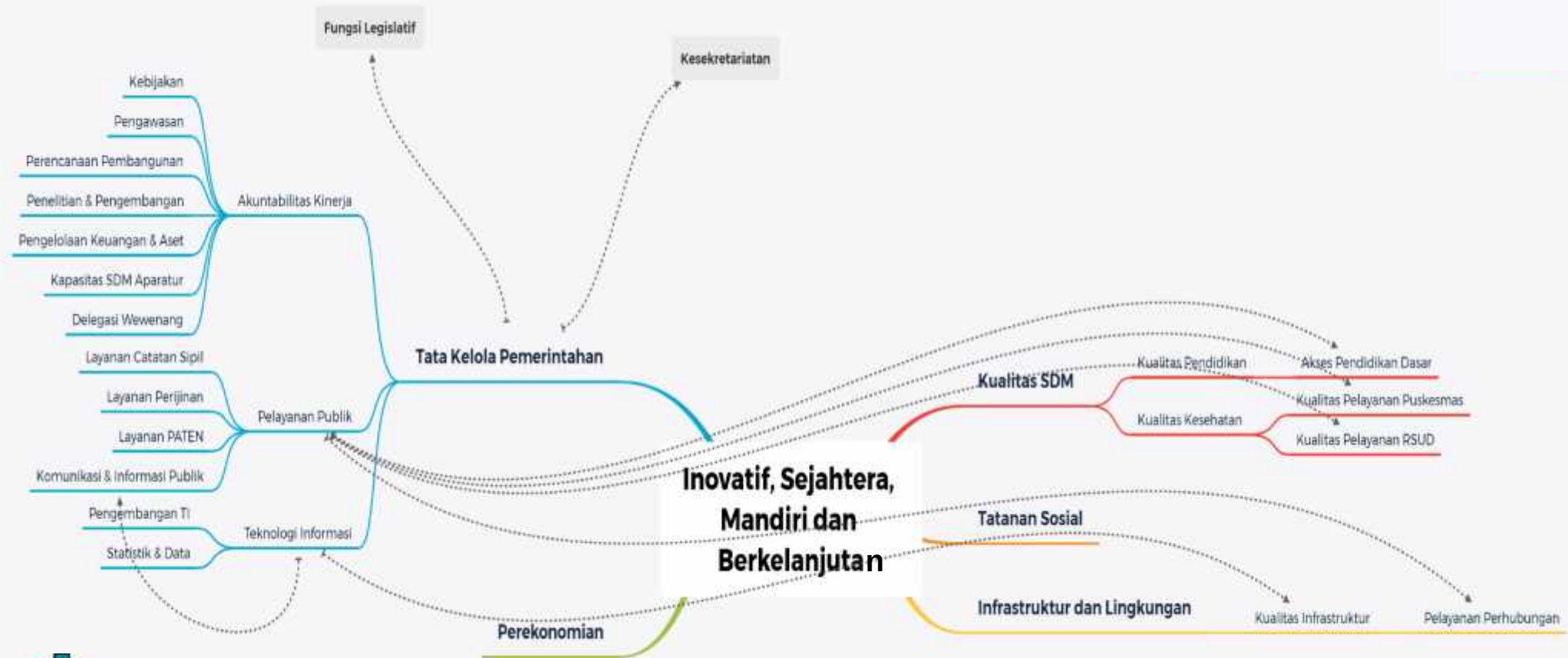
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

TUJUAN 1



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Kerangka Logis Kinerja (Kausalitas Loop) Tata Kelola Pemerintahan



Logical Framework Tujuan 1



Outcome	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan														
Indikator	Indeks Good Governance								Indeks Reformasi Birokrasi						
Intermed Outcome	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan								Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi						
Indikator	Nilai SAKIP Kabupaten		Tingkat Maturitas SPIP		Opini Atas Audit BPK		Status Kinerja EKPPD		Indeks Pelayanan Publik				Indeks SPBE		
Immediate Outcome	Kualitas Kebijakan Daerah	Kualitas Perencanaan Pembangunan	Kualitas Pengawasan	Kapasitas SDM Aparatur	Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sinergisitas Legislatif	Delegasi Wewenang Kecamatan	Kinerja Kesekretarian	Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kualitas Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal	Kualitas Pelayanan Terpadu Kecamatan	Kualitas Pengelolaan Arsip	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik	
	%Implementasi Kebijakan	Nilai PPD	Kapabilitas APIP	Indeks Profesionalitas ASN	%OPD tertib anggaran kas	Indeks Kepuasan DPRD	Nilai Kinerja Camat	Nilai SKM	Nilai SKM	Nilai SKM	Nilai SKM	Nilai SKM	%Arsip Inaktif	%OPD terkoneksi	%Penanganan pengaduan
Output	Produk Hukum Berkualitas	Kualitas Perencanaan Bidang Pemratu	Penurunan jumlah temuan	Penempatan ASN sesuai kompetensi	Peningkatan jumlah OPD tertib anggaran kas	Pelayanan prima terhadap anggota DPRD	Terendali tindak lanjut rekomendasi dari Kabupaten	Peningkatan kualitas pelayanan kesekretaratan	Peningkatan kualitas pelayanan catatan sipil	Peningkatan kualitas pelayanan perijinan	Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan	Tertib arsip dokumen	Seluruh OPD terkoneksi internet	Minimnya pengaduan masyarakat	
	Program / Kegiatan OPD terkendali	Kualitas Perencanaan Bidang Kimpraswil			Peningkatan jumlah OPD tertib barang milik daerah				Tertib dokumen kependudukan				Aplikasi terintegrasi		
	Struktur Organisasi tepat sasaran	Kajian & Penelitian menjadi bahan kebijakan													
Relasi OPD	SETDA	BAPPEDA	INSPEKTORAT	BKD	BPKAD	SETWAN	KECAMATAN	SELURUH OPD	DISPENDUKCAPIL	DPMPTSP	KECAMATAN	DISPERPUSIP	DISKOMINFO		
Relasi Urusan	Unsur Penunjang								Urusan Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil	Urusan Penanaman Modal	Unsur Penunjang	Urusan Kearsipan	Urusan Komunikasi & Informatika		



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

PROSES BISNIS Tujuan 1

Level
1



PROSES 1 : TATA KELOLA PEMERINTAHAN

PROSES UTAMA

TATA KELOLA PEMERINTAHAN 1

AKUNTABILITAS KINERJA 1.1

PERENCANAAN

KEBIJAKAN

PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET

PENGENDALIAN & PENGAWASAN

PROFESIONALISME ASN

1.2

PELAYANAN PUBLIK & PEMANFAATAN IT

KUALITAS PELAYANAN

PENGEMBANGAN IT

INFORMASI PUBLIK

PROSES PENDUKUNG

MANAJEMEN PERUBAHAN 1.3

BUDAYA KINERJA

REWARD dan PUNISHMENT

INOVASI

TEKNOLOGI INFORMASI 1.4

TATA KELOLA E-GOVERNMENT

INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI

BIG DATA INFORMATION

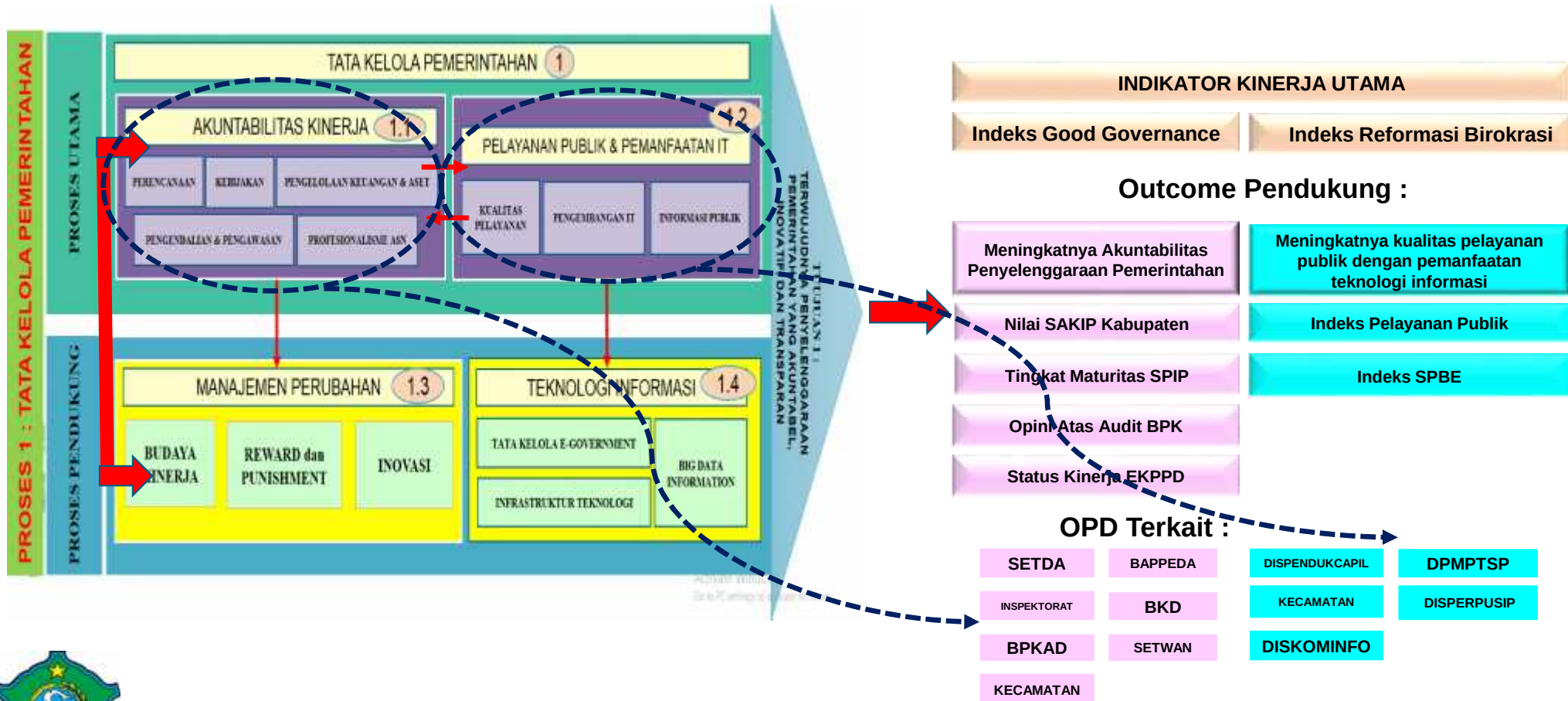
TUJUAN 1 :
TERWUJUDNYA PENYELENGKARAAN
PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL,
INOVATIF, DAN TRANSPARAN



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

RELASI Proses Bisnis dengan Desain Organisasi

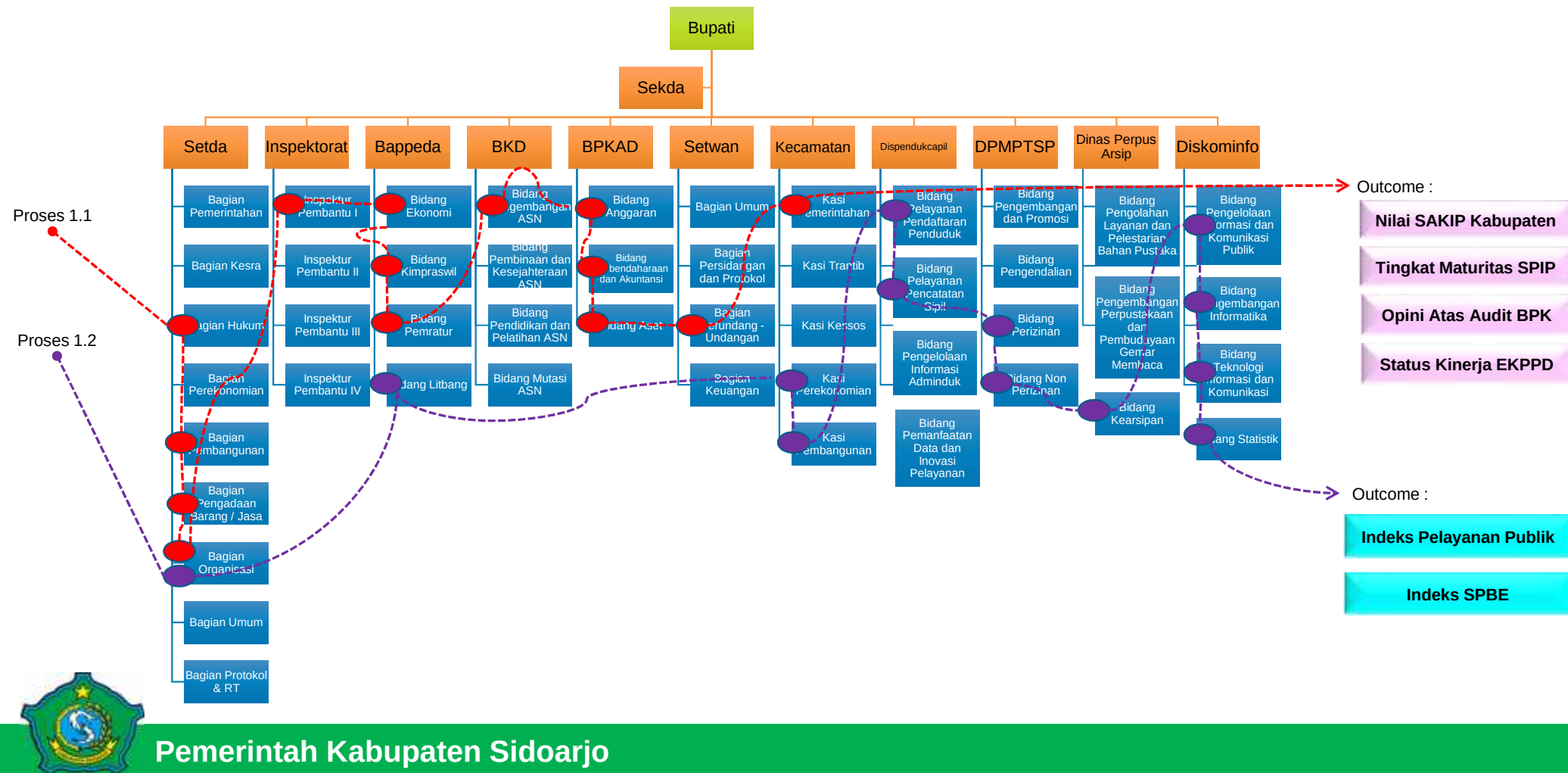
TUJUAN 1



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Penerapan Performance Based Organization

TUJUAN 1

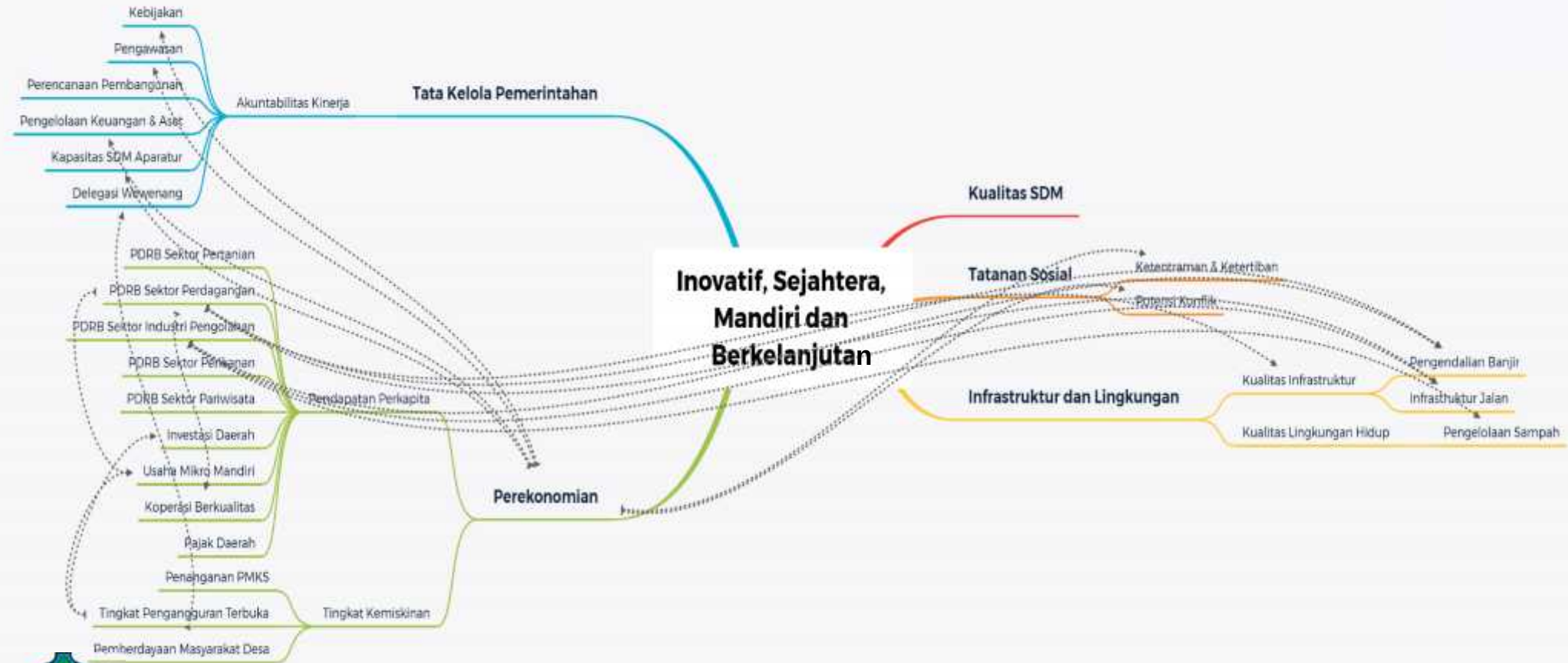


Pemerintah Kabupaten Sidoarjo



TUJUAN 2

Kerangka Logis Kinerja (Kausalitas Loop) Perekonomian



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Logical Framework Tujuan 2



Outcome	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing											
Indikator	Pertumbuhan Ekonomi								Indeks GINI			
Intermed Outcome	Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat								Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat			
Indikator	Pendapatan Perkapita								Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Kemiskinan	Persentase Desa Maju	
Immediate Outcome	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perikanan	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi dan Usaha Mikro	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Menurunnya Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	%PDRB sektor industri	%PDRB sektor Perdagangan	%PDRB sektor Perikanan	%PDRB sektor Pertanian	%PDRB sektor Pariwisata	Nilai Investasi	%Usaha Mikro Mandiri	Nilai Pajak Daerah	%TPT	%PMKS terhadap penduduk	%Desa Maju	%Desa Tata Kelola Baik
Output	Pengembangan IKM	Perindungan konsumen	Kualitas Hasil Olahan Ikan	Produktifitas Tanaman Pangan	Peningkatan jumlah wisatawan	Peningkatan Investasi	Peningkatan koperasi yang berkualitas	Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah	Peningkatan produktifitas tenaga kerja	Perlindungan PMKS	Peningkatan usaha ekonomi pedesaan	Pembinaan pemerintahan desa
	Sertifikasi Produk IKM	Kualitas Tera / Tera Ulang	Produktifitas Perikanan Budidaya	Produktifitas Peternakan		Peningkatan kerjasama investasi	Sertifikasi koperasi dan usaha mikro		Perluasan kesempatan kerja	Rehabilitasi Sosial		
		Peningkatan pasar	Produktifitas Perikanan Tangkap	Produktifitas Perkebunan			Pengembangan Usaha Mikro		Penyelesaian masalah hubungan industrial	Jaminan Sosial		
				Ketersediaan Pangan							Penguatan lembaga pedesaan	
Relasi OPD	DISPERINDAG		DINAS PERIKANAN	DINAS PANGAN TANI	DISPORAPAR	DPMPTSP	DISKOP UM	BPPD	DISNAKER	DINSOS	DINAS PMD	KECAMATAN
Relasi Urusan	Urusan Perindustrian	Urusan Perdagangan	Urusan Kelautan & Perikanan	Urusan Pangan & Urusan Pertanian	Urusan Pariwisata	Urusan Penanaman Modal	Urusan Koperasi & Usaha Mikro	Unsur Penunjang	Urusan Tenaga Kerja	Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Unsur Penunjang



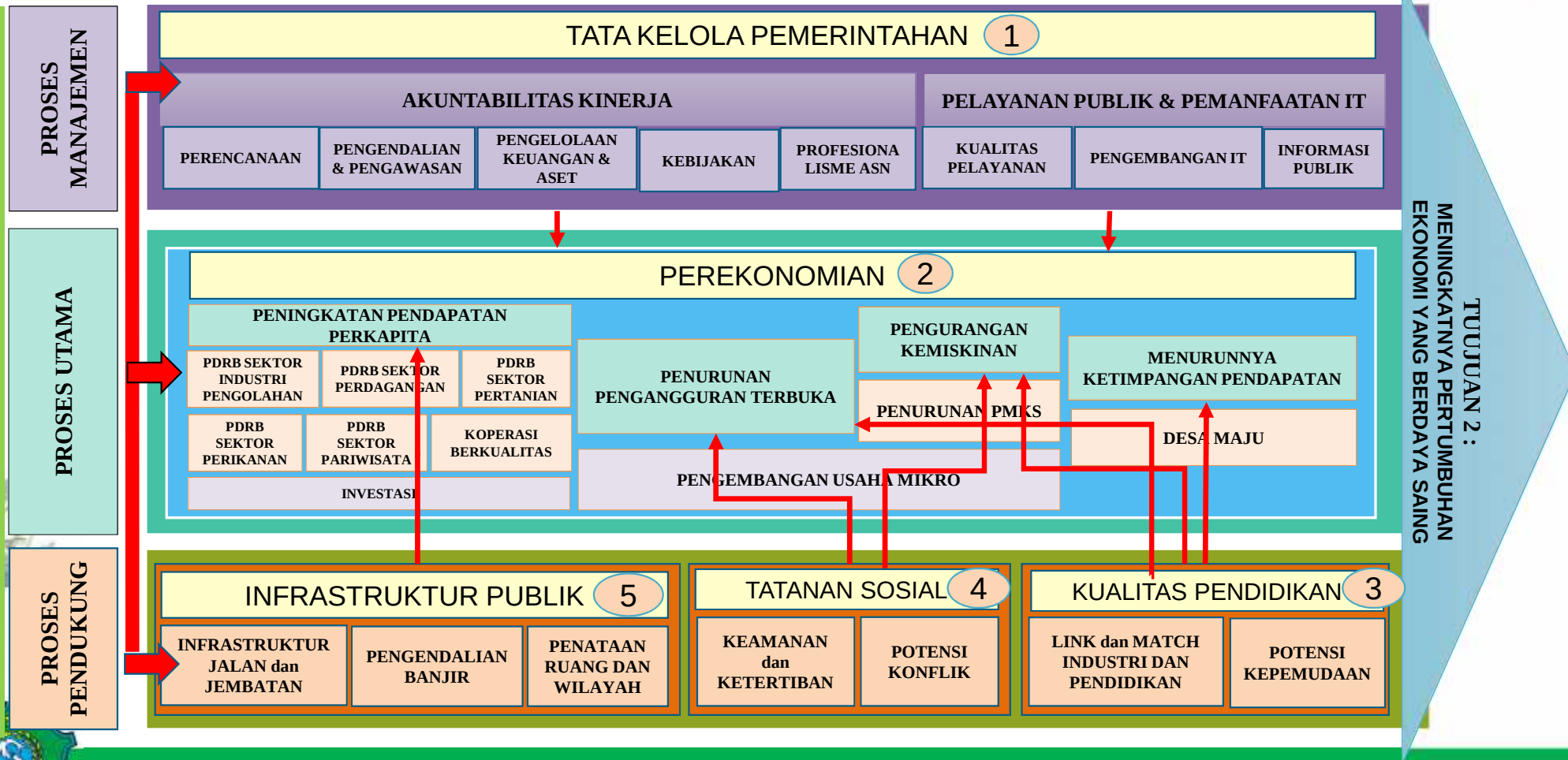
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

PROSES BISNIS Tujuan 2

Level
1



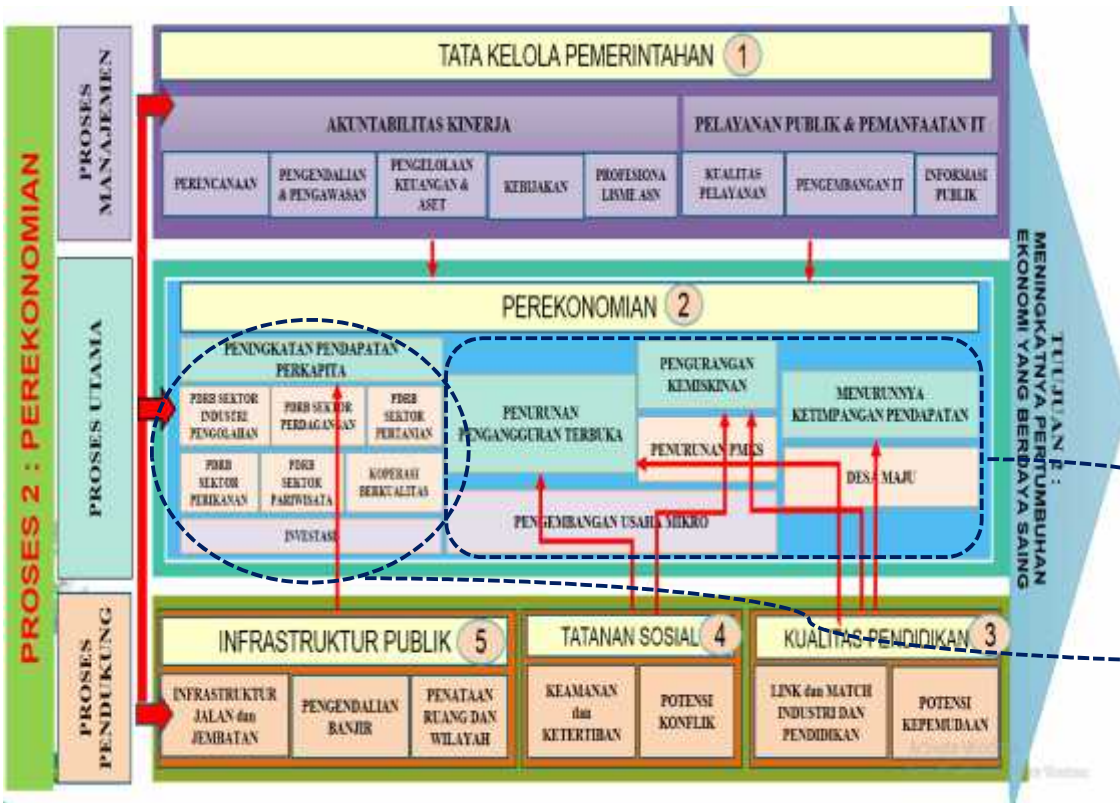
PROSES 2 : PEREKONOMIAN



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

RELASI Proses Bisnis dengan Desain Organisasi

TUJUAN 2



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pertumbuhan Ekonomi

Indeks GINI

Outcome Pendukung :

Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat

Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat

Pendapatan Perkapita

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Kemiskinan

Persentase Desa Maju

OPD Terkait :

DISPERINDAG

DINAS PERIKANAN

DISNAKER

DINSOS

DINAS PANGAN TANI

DISPORAPAR

DINAS PMD

KECAMATAN

DPMPTSP

DISKOP UM

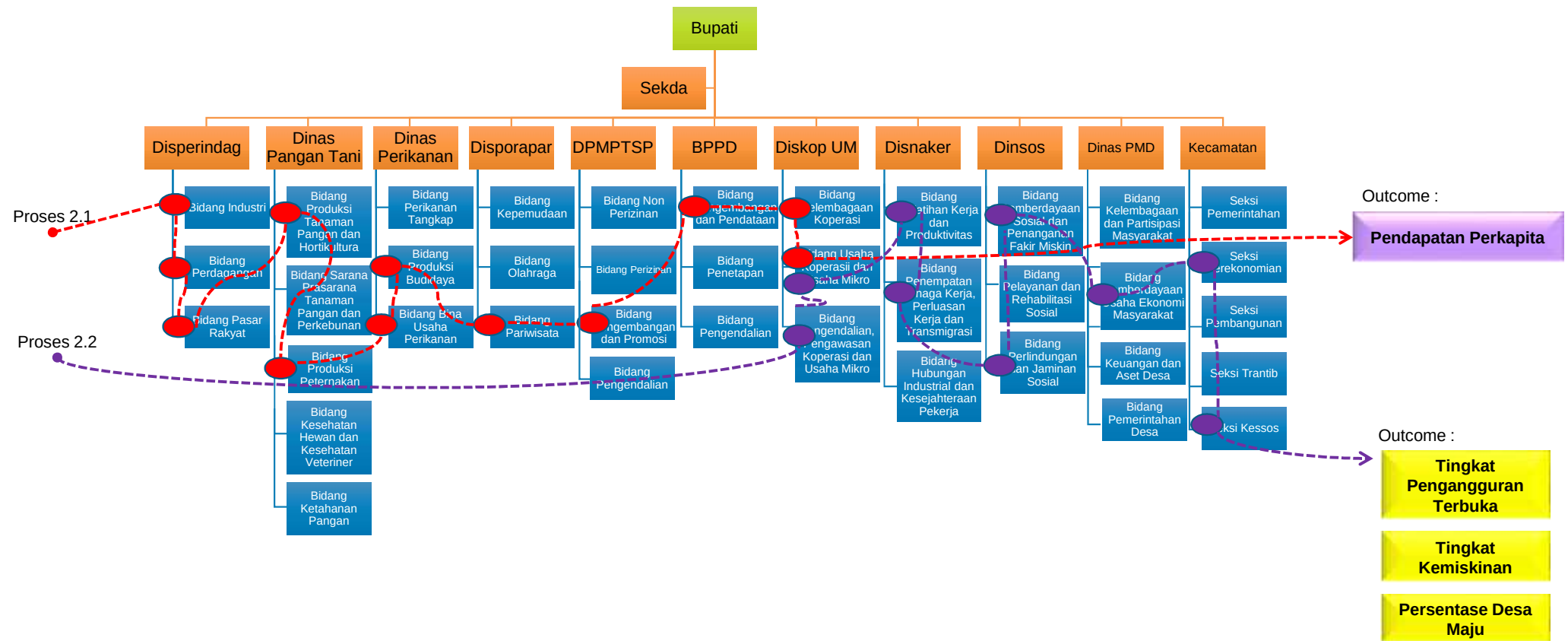
BPPD



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

RELASI Proses Bisnis dengan Desain Organisasi

TUJUAN 2



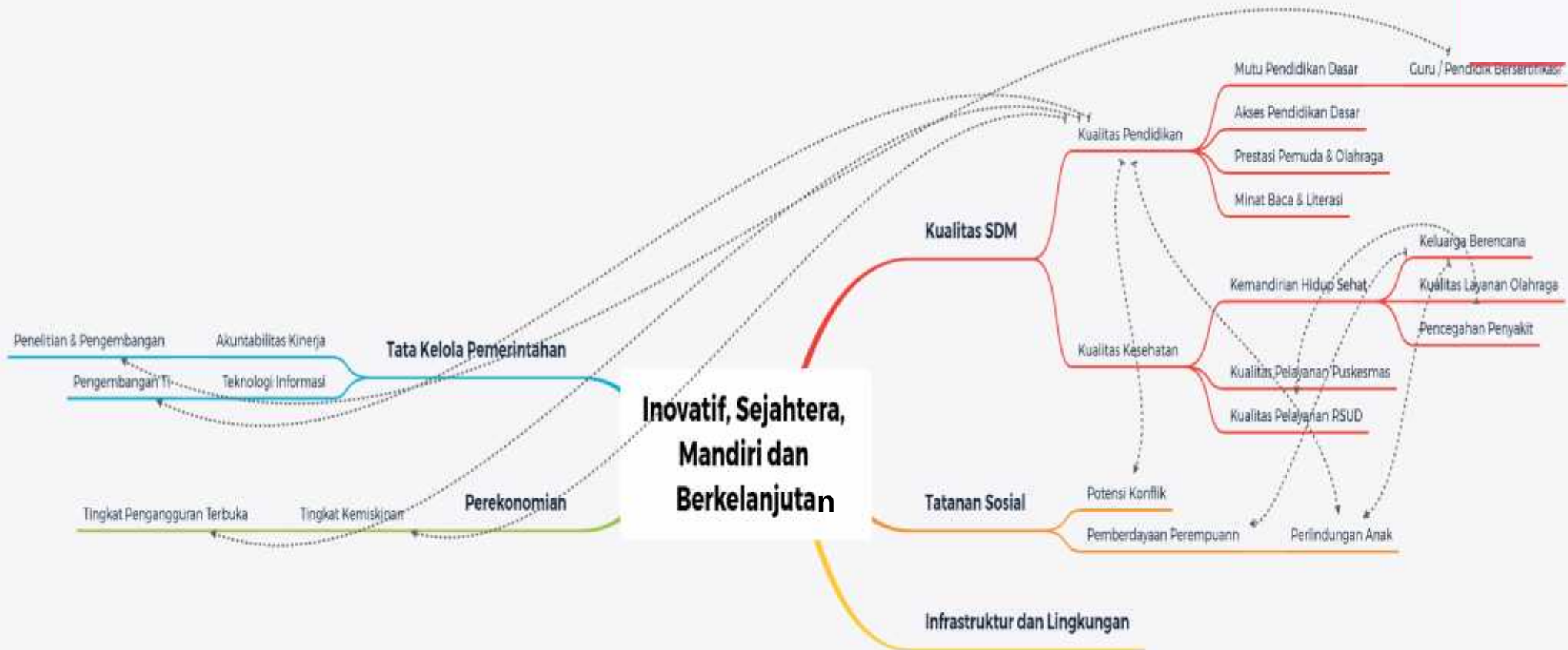
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

TUJUAN 3



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Kerangka Logis Kinerja (Kausalitas Loop) Kualitas SDM



Logical Framework Tujuan 3



Outcome	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia									
Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)									
Intermed Outcome	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat				Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat					
Indikator	Angka Harapan Lama Sekolah		Rata – Rata Lama Sekolah		Angka Harapan Hidup					
Immediate Outcome	Mutu dan Akses Pendidikan Dasar		Minat Baca Masyarakat	Prestasi Pemuda dan Olahraga	Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Kualitas Rumah Sakit Umum Daerah bertaraf Internasional	Kualitas Layanan Olahraga	Partisipasi Aktif Keluarga Berencana	Terkenda linya Penduduk
	APM, APK, Nilai UN, Rasio guru terhadap murid		Indeks Minat Baca	Jumlah Pretasi Olahraga	Nilai SKM	%Keluarga Sehat	Akreditasi RSUD	Nilai SKM	%PUS KB Aktif	Fertility Rate
Output	Mutu dan Akses Pendidikan Anak Usia Dini		Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan	Penguatan organisasi kepemudaan	Mutu dan Akses Puskesmas	Peningkatan promosi sadar sehat	Pelayanan RSUD	Pemenuhan Sarpras	Pendataan keluarga pra sejahtera	Pendataan penduduk
	Mutu dan Akses Pendidikan SD				Sarpras dan Alkes Puskesmas	Pencegahan dan pengendalian penyakit	Kualitas RSUD			
	Mutu dan Akses Pendidikan SMP		Pemasyarakatan perpustakaan	Peningkatan kualitas dan layanan olahraga	Tenaga Kesehatan Puskesmas	Pengembangan SDM kesehatan	Akreditasi RS Pendidikan	Pemeliharaan rutin	Partisipasi aktif PUS	Analisa pengendali an penduduk
	Kualitas Layanan Pendidikan				Peningkatan upaya kesehatan	Manajemen RSUD				
	Kualitas tenaga kependidikan									
Relasi OPD	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN		DINAS PERPUS ARSIP	DISPORAPAR	PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN	RSUD	DISPORAPAR	DINAS P3AKB	
Relasi Urusan	Urusan Pendidikan		Urusan Perpustakaan	Urusan Kepemudaan & Olahraga	Urusan Kesehatan			Urusan Kepemudaan & Olahraga	Urusan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

PROSES BISNIS Tujuan 3

Level
1



PROSES 3 : KUALITAS SDM

PROSES
MANAJEMEN

TATA KELOLA PEMERINTAHAN 1

AKUNTABILITAS KINERJA

PELAYANAN PUBLIK & PEMANFAATAN IT

PERENCANAAN

PENGENDALIAN
& PENGAWASAN

PENGELOLAAN
KEUANGAN &
ASET

KEBIJAKAN

PROFESIONA
LISME ASN

KUALITAS
PELAYANAN

PENGEMBANGAN IT

INFORMASI
PUBLIK

PROSES UTAMA

KUALITAS SDM 3

KUALITAS PENDIDIKAN 3.1

KUALITAS KESEHATAN 3.2

3.3
DAYA BELI

MUTU
PENDIDIKAN
DASAR

AKSESIBILITAS
PENDIDIKAN
DASAR

KUALITAS
TENAGA
PENDIDIK

MUTU KESEHATAN
PELAYANAN
KESEHATAN

KUALITAS TENAGA
KESEHATAN
AKSESIBILITAS
KESEHATAN

PENDAPATAN
PERKAPITA

PROSES
PENDUKUNG

PEREKONOMIAN 2

TATANAN SOSIAL 4

INFRASTRUKTUR
PUBLIK 5

6.1
PENDIDIKAN
TINGGI

PENURUNAN PENGANGGURAN
TERBUKA

PENGURANGAN KEMISKINAN

KELESTARIAN
BUDAYA

KEAMANAN
dan
KETERTIBAN

INFRASTRUKTUR JALAN

PENGAWASAN BANGUNAN

TATA BANGUNAN

6.2
PENDIDIKAN
MENENGAH
ATAS

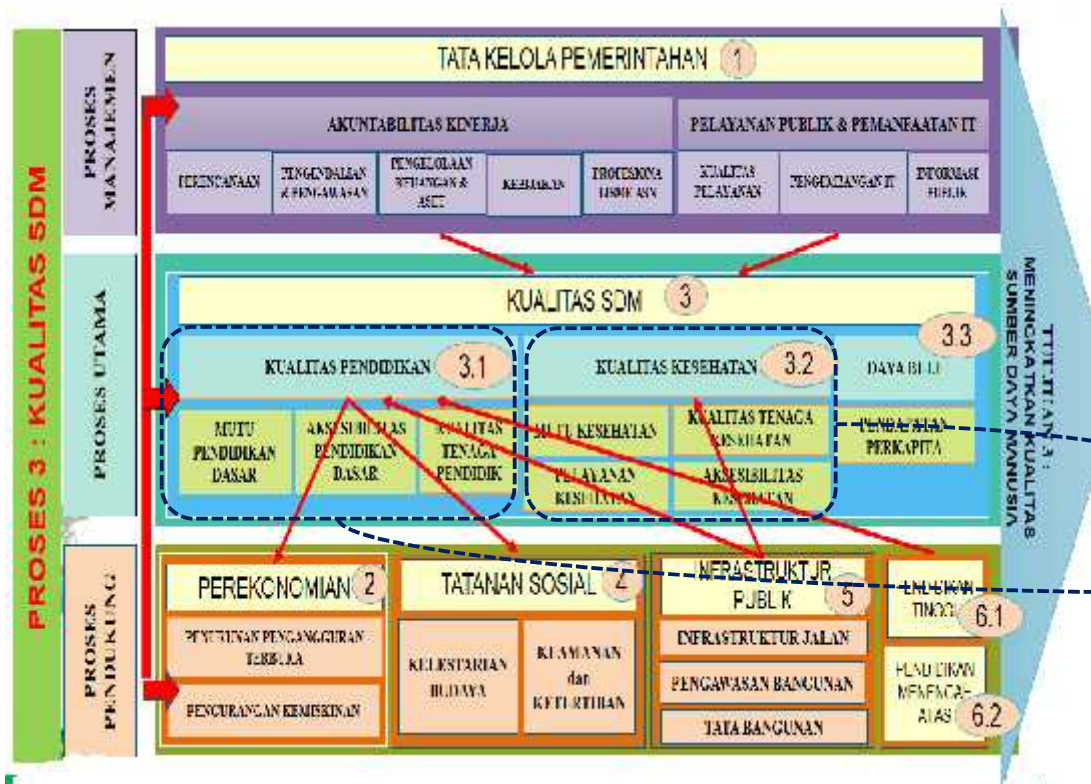
TUJUAN 3 :
MENINGKATKAN KUALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

RELASI Proses Bisnis dengan Desain Organisasi

TUJUAN 3



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Outcome Pendukung :

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Hidup

Rata - Rata Lama Sekolah

OPD Terkait :

DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

PUSKESMAS

RSUD

DINAS PERPUS ARSIP

DISPORAPAR

DINAS KESEHATAN

DISPORAPAR

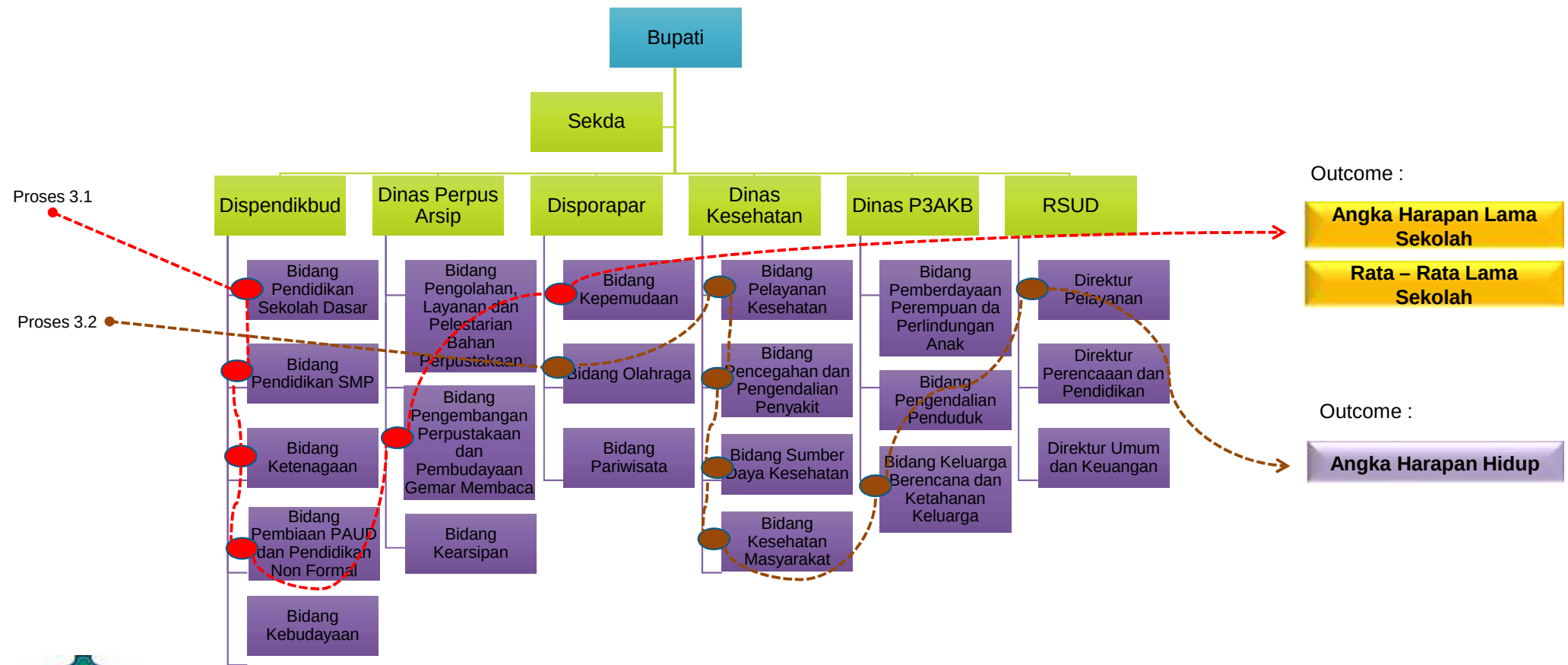
DINAS P3AKB



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

RELASI Proses Bisnis dengan Desain Organisasi

TUJUAN 3

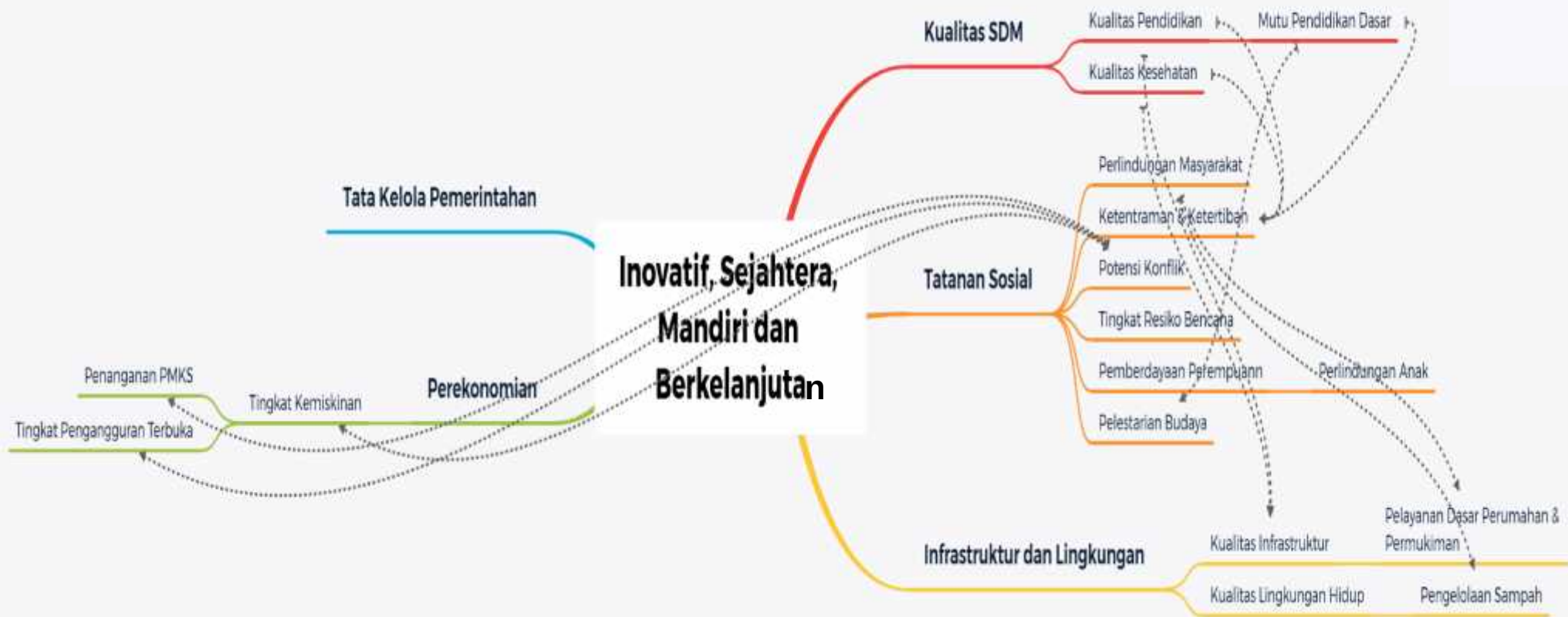


Pemerintah Kabupaten Sidoarjo



TUJUAN 4

Kerangka Logis Kinerja (Kausalitas Loop) Tatanan Sosial



Logical Framework Tujuan 4



Outcome	Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun, Aman, Tertib, Nyaman dan Berkeadilan						
Indikator	Indeks Kebahagiaan						
Intermed Outcome	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang Berkeadilan						
Indikator	Indeks Rasa Aman				Indeks Resiko Bencana	Indeks Pembangunan Gender	
Immediate Outcome	Menurunnya Potensi Konflik	Partisipasi Masyarakat dalam berpendapat	Ketentraman dan Ketertiban	Kualitas Perlindungan Masyarakat	Menurunnya tingkat resiko bencana	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peran Seni dan Budaya Lokal dalam Pembangunan
	%pencegahan potensi konflik	%masyarakat yang menggunakan hak pilih	%penyelesaian gangguan trantibum	Rasio satlinmas dengan penduduk	%kebakaran yang diselesaikan	%kasus kekerasan yang diadvokasi	Jumlah budaya yang dilestarikan
Output	Pencegahan laporan konflik	Pembinaan organisasi masyarakat	Penyelesaian gangguan kenetraman ketertiban	Peningkatan kualitas satuan perlindungan masyarakat	Pencegahan bencana	Pengarusutamaan gender	Pelestarian budaya lokal
	Penguatan wawasan kebangsaan	Pembinaan LSM	Penyelesaian pelanggaran peraturan daerah		Penanggulangan bencana kebakaran	Pemenuhan hak anak	Penyelenggaraan seni budaya
					Penanganan pasca bencana		
Relasi OPD	BAKESBANG		SATPOL PP		BPBD	DINAS P3AKB	DISPENDIKBUD
Relasi Urusan	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat					Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Urusan Kebudayaan



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

PROSES BISNIS Tujuan 4

Level
1



PROSES 4 : TATANAN SOSIAL

PROSES
MANAJEMEN

PROSES UTAMA

PROSES
PENDUKUNG

TATA KELOLA PEMERINTAHAN 1

AKUNTABILITAS KINERJA

PERENCANAAN

PENGENDALIAN
& PENGAWASAN

PENGELOLAAN
KEUANGAN &
ASET

KEBIJAKAN

PROFESIONA
LISME ASN

PELAYANAN PUBLIK & PEMANFAATAN IT

KUALITAS
PELAYANAN

PENGEMBANGAN IT

INFORMASI
PUBLIK

TATANAN SOSIAL 4

KEAMANAN dan KETERTIBAN

POTENSI
KONFLIK

AKTUALISASI
BUDAYA

PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

PENEGAKAN
PERDA

PENANGGULANGAN BENCANA

TINDAKAN PENCEGAHAN DINI

PENANGGULANGAN BENCANA

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

PENYELESAIAN KASUS
KEKERASAN PEREMPUAN
dan ANAK

INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN 5

INFRASTRUKTUR
DASAR
PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN

KELESTARIAN
LINGKUNGAN
HIDUP

KUALITAS SDM 3

KUALITAS
PENDIDIKAN

KUALITAS
KESEHATAN

PEREKONOMIAN 2

PENURUNAN
PENGANGGURAN
TERBUKA

PENGURANGAN
KEMISKINAN

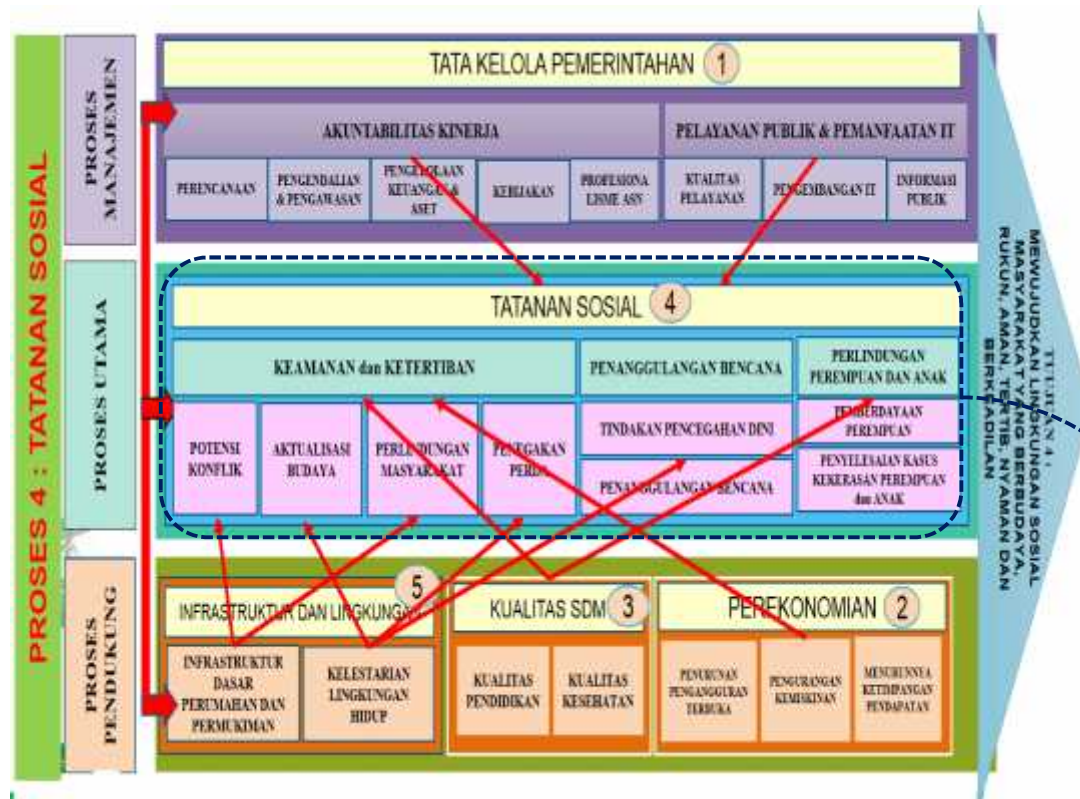
MENURUNNYA
KETIMPANGAN
PENDAPATAN

TUJUAN 4 :
MEWUJUDKAN LINGKUNGAN SOSIAL
MASYARAKAT YANG BERBUDAYA,
RUKUN, AMAN, TERTIB, NYAMAN DAN
BERKEADILAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

RELASI Proses Bisnis dengan Desain Organisasi

TUJUAN 4



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indeks Kebahagiaan

Outcome Pendukung :

Indeks Rasa Aman

Indeks Resiko Bencana

Indeks Pembangunan Gender

OPD Terkait :

BAKESBANG

BPBD

SATPOL PP

DINAS P3AKB

DISPENDIKBUD



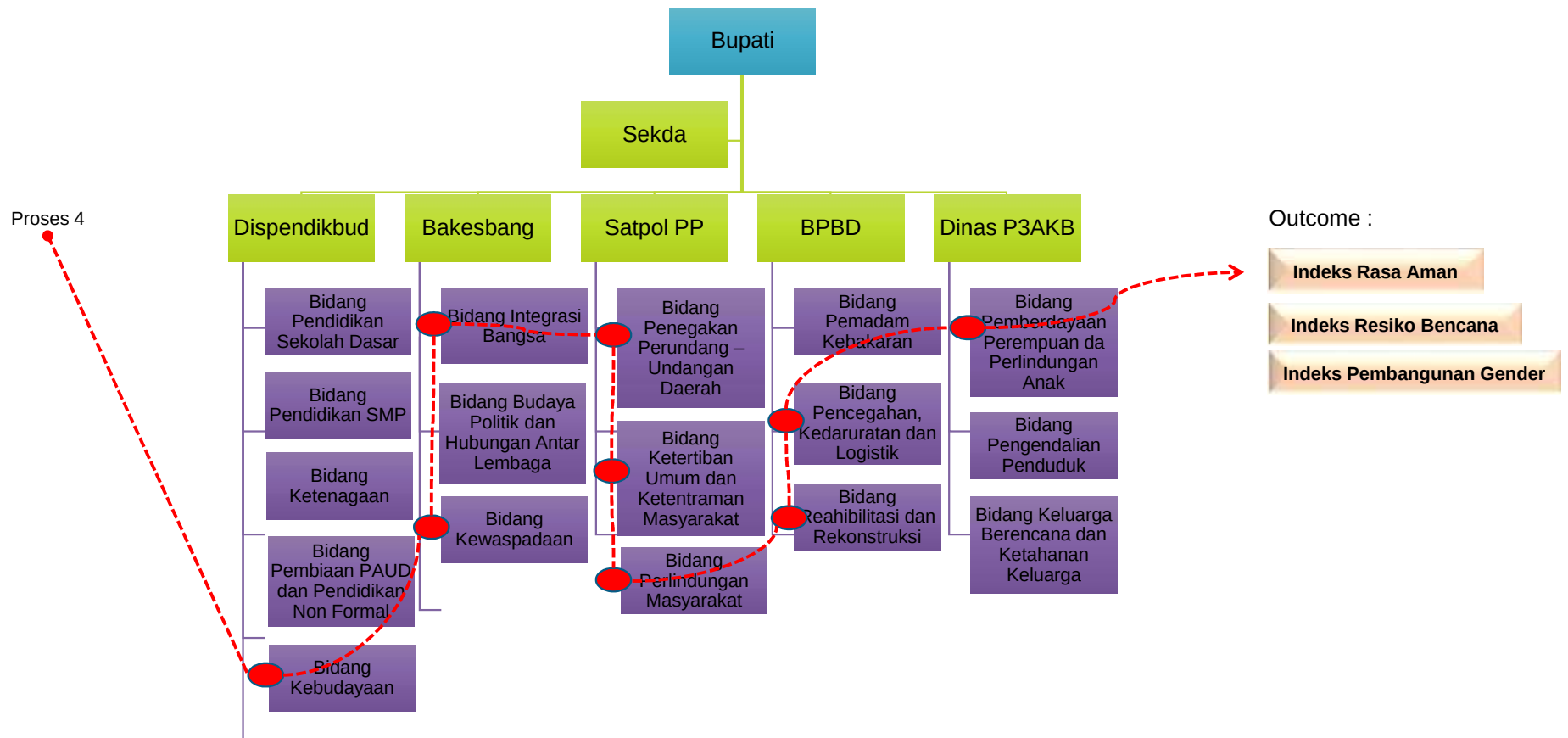
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

RELASI Proses Bisnis dengan Desain Organisasi

TUJUAN 4



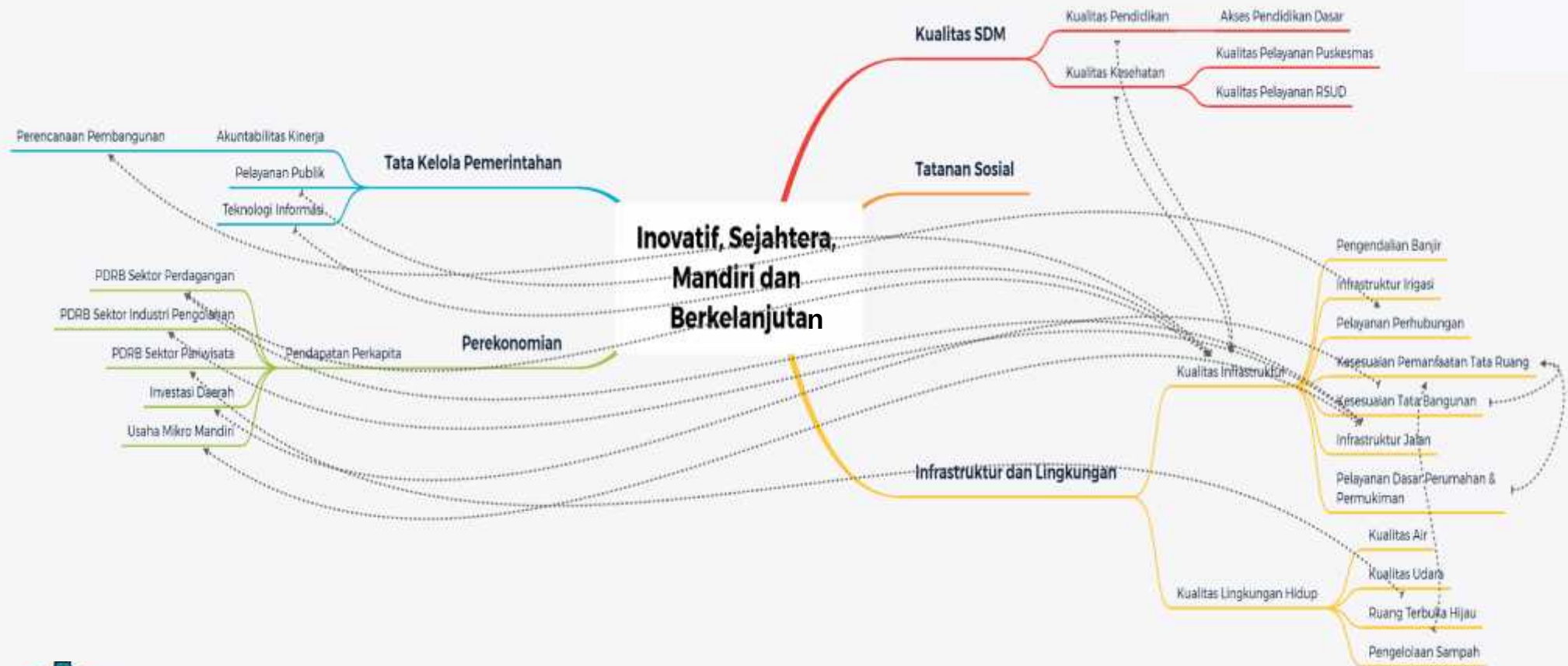
Sidoarjo
Pesona Delta



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

TUJUAN 5

Kerangka Logis Kinerja (Kausalitas Loop) Infrastruktur dan Lingkungan



Logical Framework Tujuan 5



Outcome	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta Kelestarian Lingkungan Hidup									
Indikator	Indeks Kualitas Infrastruktur									
Intermed Outcome	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah						Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup			
Indikator	Indeks Layanan Infrastruktur						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			
Immediate Outcome	Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Jalan	Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Irigasi dan Pengendalian Banjir	Pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Dasar Perumahan dan Permukiman	Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Perhubungan	Keselamatan Dalam Berlalu Lintas	Kualitas Air dan Kualitas Udara	Kualitas Pengelolaan Sampah	Kuantitas dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau	
	%jalan kondisi mantap	%penurunan luas genangan banjir	%kesesuaian dengan tata ruang	Luas kawasan kumuh	V/C Ratio	Angka fatalitas lalu lintas	Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara	%sampah terkelola	%pemenuhan RTH	
Output	Peningkatan Jalan dan Jembatan	Pengendalian banjir	Pengawasan bangunan	Pemenuhan kebutuhan air bersih	Pelayanan terminal	Pengamanan lalu lintas	Pengendalian dampak pencemaran air dan udara	Penanganan sampah	Peningkatan RTH	
	Pemenuhan kebutuhan sanitasi sehat		Pelayanan Uji KIR							
	Pemeliharaan jalan dan jembatan	Kecukupan kebutuhan air irigasi	Pengendalian tata ruang	Pemenuhan jalan lingkungan	Sarana Prasarana Perhubungan	Pengendalian operasional	Penertiban pencemaran air dan udara	Sarana prasarana persampahan	Pemeliharaan taman	
			Penyelesaian pertanahan	Sarana prasarana perumahan	Pelayanan Angkutan					
Relasi OPD	DINAS PU BMSDA		DINAS P2CKTR		DISHUB		DLHK			
Relasi Urusan	Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang			Urusan Perumahan dan Permukiman	Urusan Perhubungan		Urusan Lingkungan Hidup			



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

PROSES BISNIS Tujuan 5

Level
1



PROSES 5 : INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN

PROSES
MANAJEMEN

TATA KELOLA PEMERINTAHAN 1

AKUNTABILITAS KINERJA

PERENCANAAN
PENGENDALIAN & PENGAWASAN
PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET
KEBIJAKAN
PROFESIONALISME ASN

PELAYANAN PUBLIK & PEMANFAATAN IT

KUALITAS PELAYANAN
PENGEMBANGAN IT
INFORMASI PUBLIK

PROSES
UTAMA

INFRASTRUKTUR 5.1

INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
PENGENDALIAN BANJIR
PENATAAN RUANG
INFRASTRUKTUR IRIGASI
INFRASTRUKTUR DASAR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
PELAYANAN PERHUBUNGAN

LINGKUNGAN 5.2

KUALITAS BAKU MUTU UDARA
PENGELOLAAN SAMPAH
KUALITAS BAKU MUTU AIR SUNGAI
PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU

PROSES
PENDUKUNG

PEREKONOMIAN 2

PENINGKATAN PENDAPATAN PERKAPITA
PENURUNAN PENGANGGURAN TERBUKA
PENGURANGAN KEMISKINAN
MENURUNNYA KETIMPANGAN PENDAPATAN

KUALITAS SDM 3

KUALITAS PENDIDIKAN
KUALITAS KESEHATAN

TATANAN SOSIAL 4

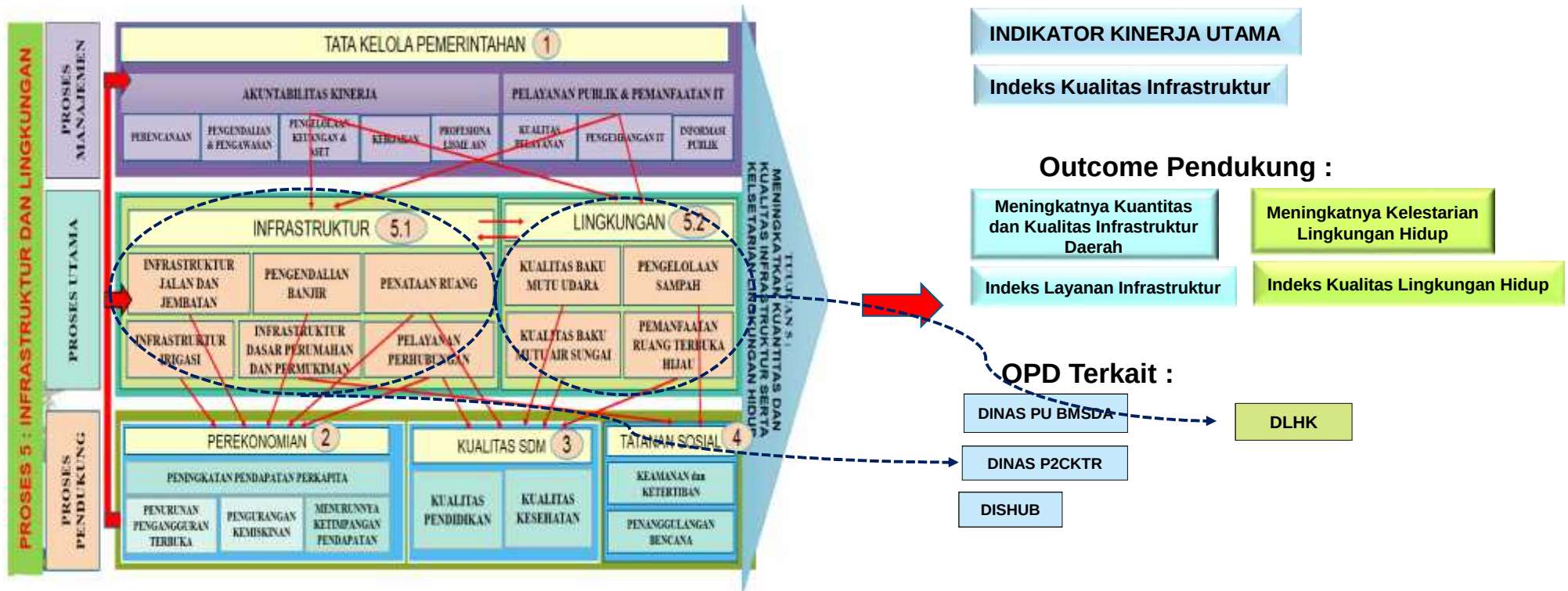
KEAMANAN dan KETERTIBAN
PENANGGULANGAN BENCANA

TUJUAN 5 :
MENINGKATKAN KUANTITAS DAN
KUALITAS INFRASTRUKTUR SERTA
KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

RELASI Proses Bisnis dengan Desain Organisasi

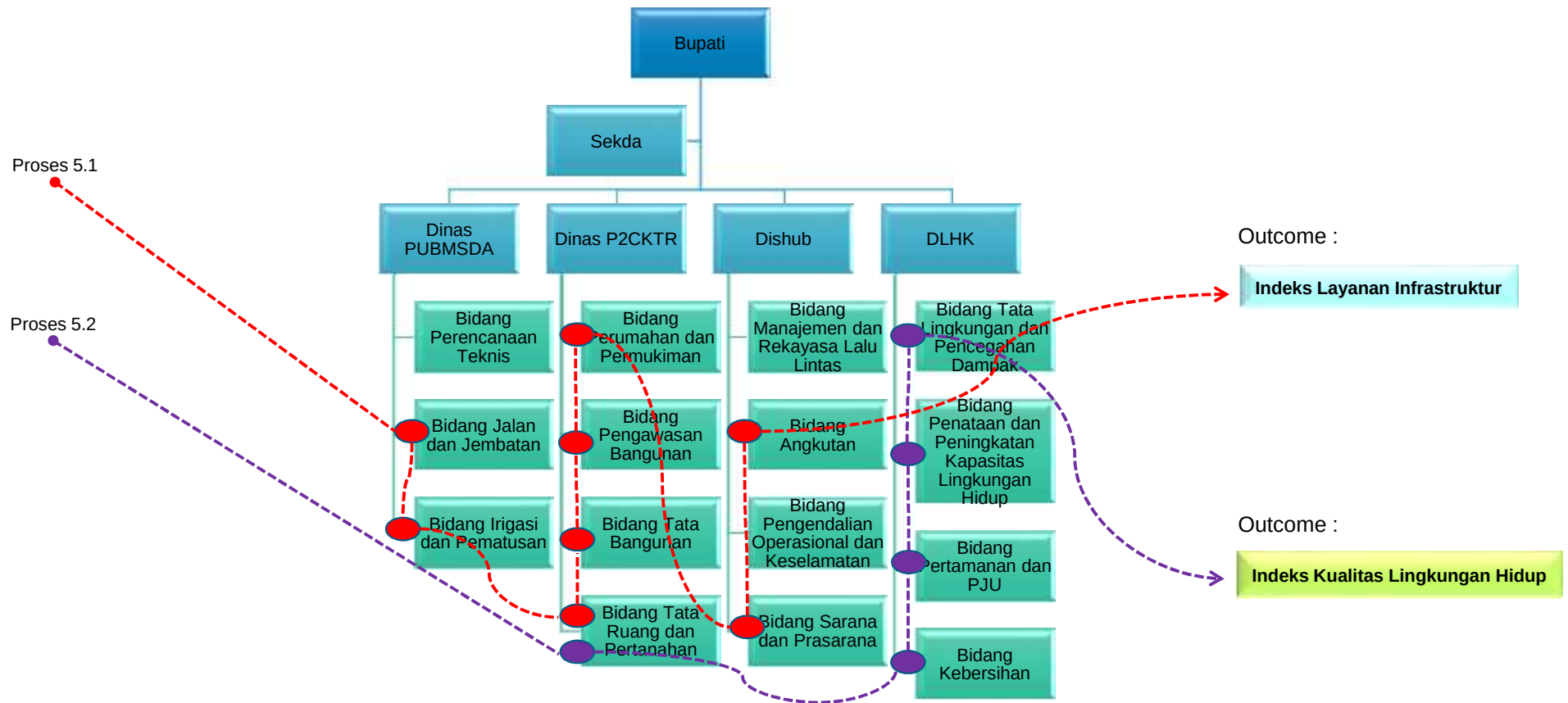
TUJUAN 5



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

RELASI Proses Bisnis dengan Desain Organisasi

TUJUAN 5

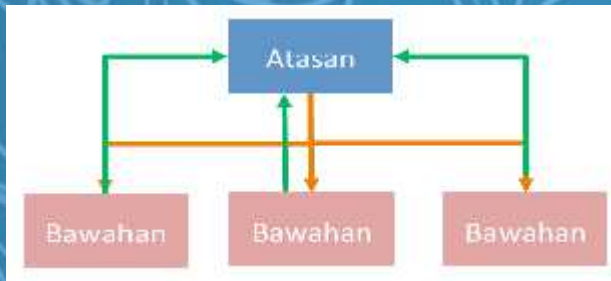


Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Peningkatan Implementasi SAKIP



Keselarasan Kinerja Organisasi dan Kinerja Individu Melalui Aplikasi e-Kinerja



Keunggulan Aplikasi e-Kinerja

1 Memahami core bisnis jabatan

2 Menyusun Perjanjian Kinerja

3 Menyusun Rencana Aksi

4 Mengevaluasi Capaian Kinerja

5 Bimbingan dan Review Atasan

6 Pemberian Tunjangan Kinerja

Menjamin Keselarasan Kinerja Organisasi dengan Kinerja Individu melalui open Peta Proses Bisnis

Bawahan dapat mengetahui secara langsung kinerja Atasan Langsungnya, sehingga ada keterkaitan kinerja

Indikator Kinerja dan Target pada PK telah terintegrasi dengan aplikasi penganggaran

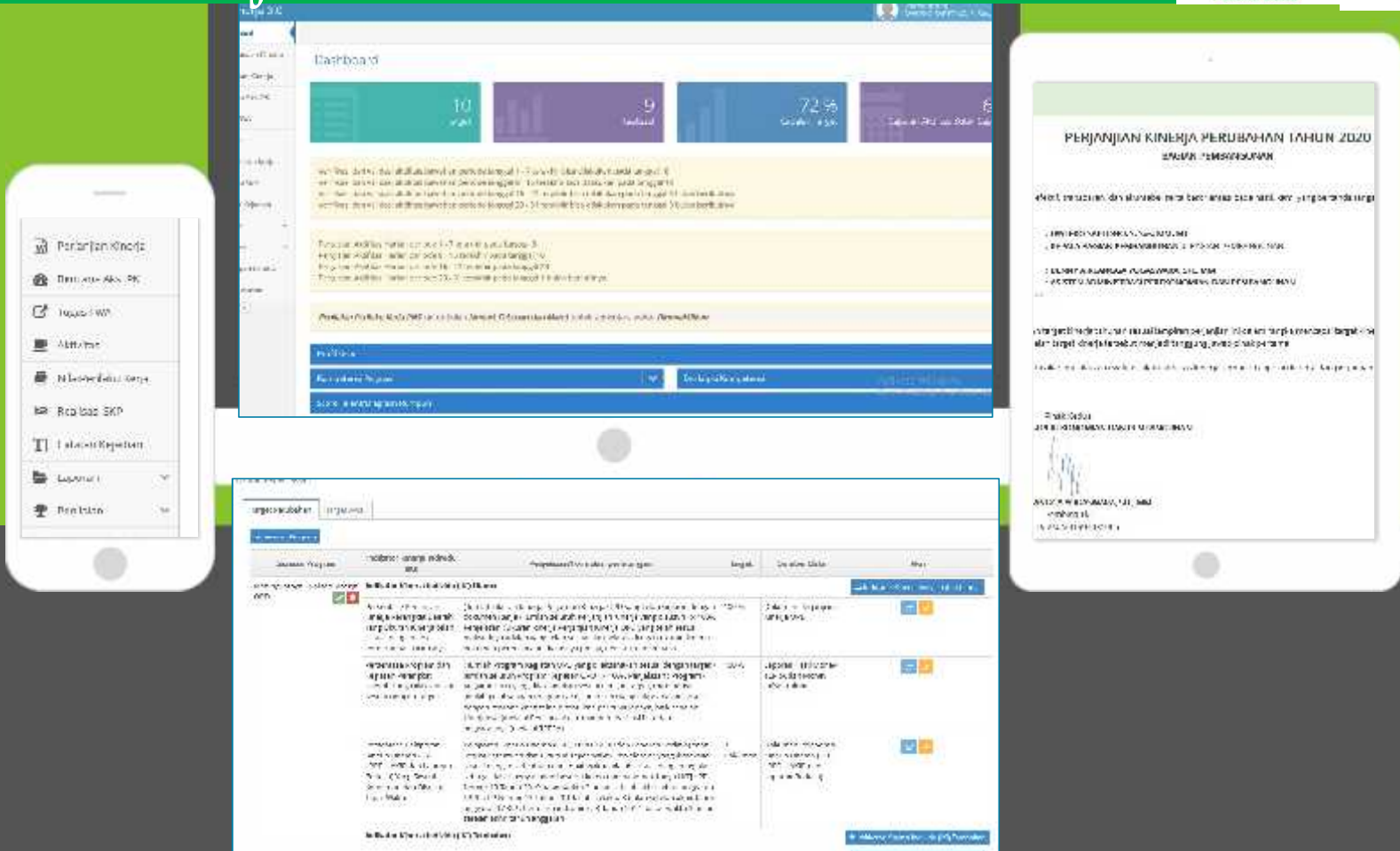
Penyusunan PK dan IKI dalam satu form agar sinkron

SKP secara langsung menjadi Rencana Aksi Kinerja Individu untuk mencapai target yang diperjanjikan pada PK

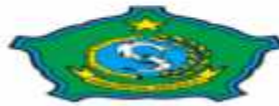
Terdapat pemantauan atas realisasi target rencana aksi secara berkala, dengan disertai Bimbingan Kinerja dan Review Atasan



Keselarasan Kinerja Organisasi dan Kinerja Individu Melalui Aplikasi e-Kinerja



Aplikasi Manajemen Kinerja Daerah (Aplikasi RDS)



PERENCANAAN KABUPATEN SIDOARJO

Mewujudkan Visi Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Adipati



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Aplikasi Manajemen Kinerja Daerah (Aplikasi RDS)



Regional Development System (RDS)

Sistem Manajemen Kinerja Daerah yang dilaksanakan melalui keterpaduan dan konsistensi langkah mulai perencanaan -> standarisasi harga barang / jasa -> penganggaran -> proses pengadaan barang / jasa -> pengukuran kinerja -> monitoring dan evaluasi kinerja

5 KEUNGGULAN RDS

- **KONSISTENSI**, Kesenambungan visi-misi sampai dengan target indikator bisa dipertahankan karena bisa dilakukan penguncian melalui sistem.
- **TRANSPARANSI**, Kecamatan dan anggota DPRD dapat memantau perjalanan usulan *bottom up* melalui sistem.
- **KESERAGAMAN**, Penggunaan erego yang berisi standar belanja, standar biaya, dan ASB menjamin keseragaman nama barang, kode rekening, dan harga
- **EFEKTIF**, Dengan RDS kebijakan penganggaran yang dikeluarkan oleh TAPD bisa diterapkan secara efektif, karena perubahan-perubahan yang mendasar bisa dilakukan melalui sistem
- **EFISIEN**, Pelaksanaan verifikasi yang semula membutuhkan banyak kertas, karena manual, dapat dilakukan secara *paperless* sehingga menghemat penggunaan kertas. Selain itu, satu kali input oleh PD juga menghemat waktu dalam melakukan pekerjaan perencanaan.



Penguatan Kualitas Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Melalui Aplikasi e-Monev



MONEV 2020

DEKRETARAT DAERAH

Realisasi Renja E-MONEV

TRIMULAN
Trimulan 2

Catatan Revisi

? Batasi Diversifikasi ☒ Ditinjau

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Program (output)/ kegiatan (output))	Pagu Anggaran	TARGET Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Total Kinerja TW1-TW4	Realisasi Anggaran	Status
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program pelayanan publik	• Penyusunan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan • Pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan	Rp. 10.440.000	100	%	100	100	Rp. 10.440.000	Diterima oleh Pemangku
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program pelayanan publik	• Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan	Rp. 10.440.000	100	%	100	100	Rp. 10.440.000	Diterima oleh Pemangku
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program pelayanan publik	• Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan	Rp. 10.440.000	100	%	100	100	Rp. 10.440.000	Diterima oleh Pemangku
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program pelayanan publik	• Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan	Rp. 10.440.000	100	%	100	100	Rp. 10.440.000	Diterima oleh Pemangku

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Manfaat Aplikasi e-Monev

Memantau Progres Capaian Kinerja Program dan Kegiatan secara berkala / triwulanan

Menunjukkan bukti dan dokumentasi pendukung sebagai laporan hasil kinerja

Terdapat mekanisme verifikasi dan Review atas capaian kinerja Program dan Kegiatan, beserta hambatan dan permasalahan

Menjadi bahan pertimbangan penyusunan perencanaan



Penguatan Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan Melalui Aplikasi e-Kenda (Pengendalian secara Elektronik)



Sebagai Pengembangan dan Penguatan Aplikasi e-Monev

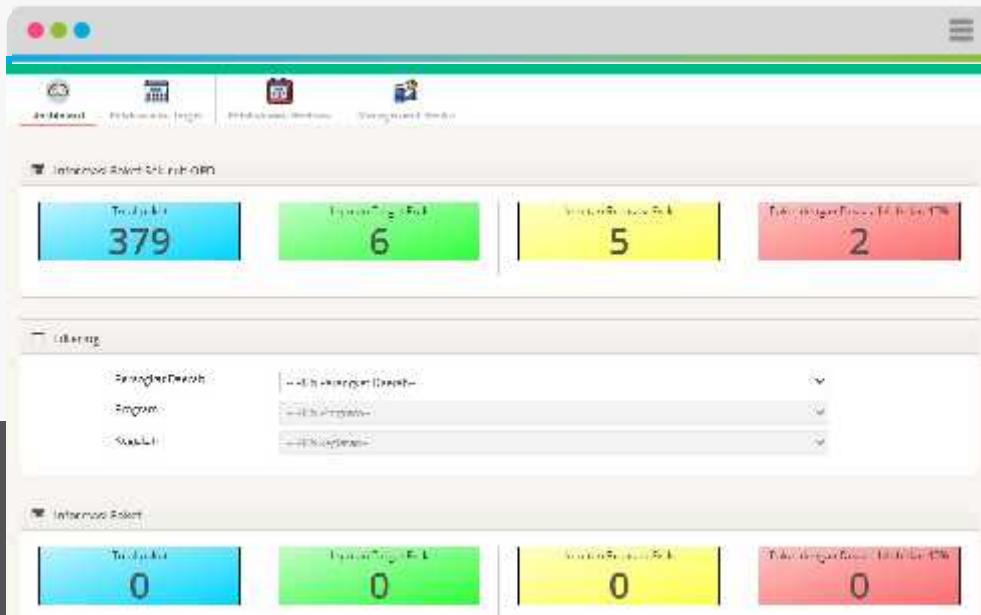
Keunggulan Aplikasi e-Kenda

Terdapat Manajemen Resiko Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Paket Kegiatan sebagai mitigasi resiko kegagalan

Menunjukkan realisasi progres pelaksanaan Program Kegiatan secara real time

Sebagai masukan Pimpinan dalam pengambilan keputusan terhadap permasalahan pelaksanaan Program Kegiatan

Sebagai early warning system bagi OPD dalam pengendalian pelaksanaan Program Kegiatan



Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja OPD



Penguatan SPIP dengan manajemen resiko hingga level Kegiatan



Pendampingan dan Asistensi untuk OPD yang Nilai SAKIP masih pada kategori 'B'



Pemberian reward berupa insentif untuk OPD yang Nilai SAKIP 'A' dan mendapat Predikat ZI WBK WBBM



Pemberian reward untuk Kecamatan ber-Kinerja Terbaik



SKPD : Kecamatan ...
 Nama Kegiatan : ...
 Tujuan Kegiatan : ...

Aspek Risiko

... Kelangkaan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
 ... untuk mendukung pelaksanaan program / kegiatan OTD
 ... sistem integral RDS (Regional Development System)

Urutan Aspek	Skor Kemampuan	Skor Dampak	Skor Status
1. Strategi yang telah ditetapkan dalam ASB sudah tidak sesuai	3	4	12
2. Tidak adanya kebijakan penerapan Peraturan Menteri 70 / 2019 dan Peraturan Menteri 90 / 2019 yang mewajibkan setiap Pemerintah Daerah menggunakan Aplikasi SIPD	4	4	16
3. Struktur database pada aplikasi SIPD belum support dengan konfigurasi yang terdapat pada Peraturan Menteri 90 / 2019	1	4	12

SEKID : SECRETARIAT DAERAH
 Bidang Kegiatan : **Kepidemi dan Penyakit Menular** (berdasarkan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah)
 Tujuan Kegiatan : 1. **Terdapat sumber tenaga kesehatan terampil** (sebagai tenaga kesehatan masyarakat) di program/kegiatan CPD

2. Tercapainya sistem integrasi RBS (Regional Development System)					
No	Kriteria	Yang sudah tercapai		Yang masih dibutuhkan	KSP
		Uraian	D/ K/ E/ TE		
1	tercapainya yang telah ditunjukkan dalam ASB untuk tidak berlaku	pengembangan sistem RBS RBS dan RBS	A	Kapasitas ASB RBS dan RBS	
2	tercapainya yang telah ditunjukkan dalam ASB untuk tidak berlaku	Mengembangkan RBS RBS dan RBS	E	Membangun database lokal yang terintegrasi	
3	tercapainya yang telah ditunjukkan dalam ASB untuk tidak berlaku	Mengembangkan RBS RBS dan RBS	E	Membangun database lokal yang terintegrasi	

SKPD	: SEKRETARIAT DAERAH
Nama Kegiatan	: <u>Facilitasi Penyusunan Kebijakan Program dan kegiatan Pemberdayaan Daerah</u>
Tujuan Kegiatan	: 1. <u>Terusunnya kebijakan terkait standarisasi penyusunan program/kegiatan OPD</u> 2. <u>Terapuskannya sistem integral RDS (Regional Development System)</u>

No	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Pemangku Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Harga barang yang telah ditetapkan dalam ASE sudah tidak relevan	Kajian ASE Fisik dan Non Fisik	2020	Bagian Pembangunan	
2.	Ditetapkannya kebijakan penarikan Peraturan 70 / 2019 dan Peraturan 90 / 2019 yang memisahkan setiap Pemerintah Daerah, menggunakan Aplikasi SIPD	Membuat database lokal yang diimport dari SIPD	2020	Bagian Pemerintahan	
3.	Struktur Database pada aplikasi RDS belum support dengan kodefikasi yang terdapat pada Peraturan 90 / 2019	Test dan error aplikasi di setiap fitur dan menu	2020	Bagian Pembangunan	

**SPIP menjadi 5%
penilaian SAKIP**

KABUPATEN SIDOARJO
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Sudarmaji Kuryo No.1 Sidarjo 60132 Faks 031 8941145
Telp 031 8941145
Email: sekretariat@sidarjo.go.id Website : www.sidarjo.go.id

Sidoarjo, 07 Agustus 2020

Kepada
Kepala OPD se-Kabupaten
Sidoarjo
di
SIDOARJO

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP, pedoman yang digunakan adalah Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Strategi Pelaksanaan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sanggau, dengan penyederhanaan sebagai berikut :

Adapun cara perhitungan nilai evaluasi implementasi SAKOP OPD tahun 2020 sebagai berikut :

Komponen SAKIP	Bobot nilai komponen SAKIP	Hasil dari komponen SAKIP (25%)	Hasil Penilaian risiko OPD	Hasil dari penilaian risiko OPD (5%)	Nilai SAKIP (100%)
1. Perencanaan	30	Bobot nilai komponen SAKIP x 25%	4. Hasil kegiatan OPD yang disusun penjabaran maknanya /	Hasil penilaian risiko OPD x 5%	6 = (3+5)
a. Kebijakan	10		Berikut hasil kegiatan OPD pada OPA x 100%		
b. Pengukuran Kinerja	25				
c. Pengukuran Kinerja	15				
d. Evaluasi Internal	20				
e. Capaian Kinerja	20				
Skor maksimal	100	95	100%	5	100

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

SEKRETARIS DAERAH
 <https://www.stmmdm.com>
 Drs. ACHMAD ZAIRI, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19640113119910110003

Pendampingan dan Asistensi OPD dengan Nilai SAKIP 'B'



- ☐ Pendampingan dilakukan secara online melalui video conference
- ☐ Dilakukan dengan mereview kembali hasil evaluasi tahun sebelumnya
- ☐ Menghimbau OPD agar menindak lanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi tahun sebelumnya
- ☐ Menekankan pada OPD bahwa tahun 2020 sudah 'Zero B' , jadi jika masih ada OPD yang nilainya 'B' maka akan ada punishment



Pemberian Reward untuk OPD Nilai SAKIP 'A' dan Zona Integritas Predikat 'WBK / WBBM'



- ❑ Diberikan reward berupa insentif bimtek peningkatan implementasi SAKIP untuk OPD dengan Nilai SAKIP 'A' dan OPD berpredikat ZI WBK / WBBM
- ❑ Terdapat 11 OPD dengan Nilai SAKIP 'A', dan 3 OPD berpredikat unit kerja 'WBK'

OPD Nilai SAKIP 'A'

- Reward insentif 75 juta

OPD Predikat ZI WBK

- Reward insentif 75 juta

OPD Predikat ZI WBBM

- Reward insentif 100 juta

Reward SAKIP Kecamatan (bagi Pembina/mentri)		200.000.000,00
OPD Dengan Nilai SAKIP Kategori A (Memuaskan) :		
1	Rumahnya Sakip Umum Daerah	
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	75.000.000,00
3	Dinas Kesehatan	75.000.000,00
4	Inspektoriat	
5	Badan Pelayanan Pajak Daerah	75.000.000,00
6	Badan Pengawasan Daerah	75.000.000,00
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
8	Dinas Tenaga Kerja	75.000.000,00
9	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	75.000.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75.000.000,00
11	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	75.000.000,00
OPD Dengan Predikat Zona Integritas WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) :		
1	Kecamatan Sukodono	75.000.000,00
2	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	75.000.000,00
OPD Dengan Predikat Zona Integritas WBBM (Wilayah Bebas dari Masalah Pelayanan) :		
1	Rumahnya Sakip Umum Daerah	
		950.000.000,00



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo



CAPAIAN KINERJA



CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 - 2021

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	BASELINE DATA	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	TARGET	Sumber Data
			2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	
1	Indeks Good Governance	Poin	*)	65,35	65,35	66,31	63,96	67,33	69,19	69,32	74,24	69,55	70,76	Bappeda
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	NA	C	C	B	B	B	B	B	B	B	B	Kemenpan RB
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,24	5,51	5,51	5,63	5,80	5,65	6,02	5,67	5,99	5,75	5,85	BPS
4	Indeks Gini	Poin	0,35	0,37	0,37	0,37	0,34	0,37	0,35	0,37	*)	0,37	0,37	BPS
5	Tingkat Kemiskinan	%	6,44	6,39	6,39	6,38	6,23	6,37	5,69	6,36	5,32	6,35	6,34	BPS
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,3	6,12	6,12	5,93	4,97	5,74	4,73	5,56	4,72	5,37	5,19	BPS
7	Indeks Infrastruktur	Poin	1,402	1,406	1,406	1,41	1,41	1,414	1,419	1,418	1,417	1,422	1,426	Bappeda
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	77,43	78,17	78,17	78,61	78,70	78,84	79,50	79,51	80,05	79,96	80,57	BPS
9	Indeks Kebahagiaan	Poin	*)	77,11	77,11	77,65	78,58	78,23	79,37	79,83	80,28	80,47	81,14	Bappeda
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	49,47	49,26	49,26	50,01	48,79	51,01	55,10	52,01	61,03	53,01	54,26	Dinas LHK

Keterangan : *)Belum ada rilis dari instansi berwenang



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

REFOCUSSING RPJMD Kabupaten Sidoarjo

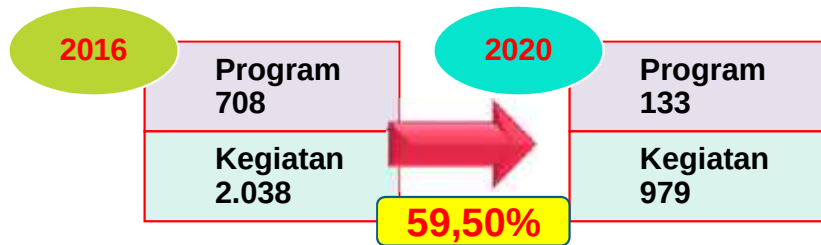


Restrukturisasi RPJMD Tahun 2016 – 2021

	SEBELUM		SESUDAH
Σ TUJUAN	14	64,29%	5
Σ INDIKATOR TUJUAN	15	53,33%	7
Σ SASARAN	24	62,50%	9
Σ INDIKATOR SASARAN	56	69,64%	17
Σ PROGRAM	708	81,21%	133
Σ KEGIATAN	2.038	51,96%	979



EFEKTIFITAS & EFISIENSI Dalam Penganggaran Tahun 2020 Melalui Penerapan Performance Based Budgeting



NILAI EFISIENSI

626 M

Kebijakan *Performance Based Budgeting* :



Memastikan kinerja apa yang akan dihasilkan terlebih dahulu, sebelum mengajukan anggaran (*Money Follow Result*)



Fokus pada Prioritas Tematik Pembangunan



Menyusun Analisa Standart Biaya (ASB) Kegiatan, yang selanjutnya akan disusun ASB Program



Menyusun Meta Program dan Meta Kegiatan (Kerangka Acuan Kinerja) dalam pengajuan anggaran



Efisiensi Belanja Operasional (ATK, Perjalanan Dinas, dll) pada satu Kegiatan



Re-Focussing Program dan Kegiatan

Re-Strukturisasi Organisasi



EFISIENSI

EFISIENSI
DIMANFAATKAN
UNTUK :



Penguatan Ekonomi Lokal



Peningkatan Infrastruktur Publik



Pemberian Reward Kinerja



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Kebijakan Penanganan Covid-19



KEBIJAKAN DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19

Refocusing Anggaran Belanja sesuai Inmendagri Nomor 1 Tahun 2020 dan Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Keuangan No. 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020

Adanya penyesuaian atas indikator makro daerah Tahun 2020 dan 2021

Penyesuaian Tema dalam RKPD Tahun 2021 menyesuaikan Tema RKP Pusat dan RKPD Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan dalam Permendagri 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021.

Diterbitkannya Peraturan dan Keputusan Bupati terkait Penanganan Covid-19.

Pengalokasian anggaran hasil Refocusing untuk penanganan Bidang Kesehatan, Dampak Ekonomi dan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*)



REGULASI DAERAH UNTUK PENANGANAN COVID-19

Perbup 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Sidoarjo

Perbup 32 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sidoarjo

Perbup 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan dari Masyarakat dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sidoarjo

Perbup 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Sidoarjo

Perbup 39 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Sidoarjo

Perbup 41 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Sidoarjo

Perbup 44 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Yang Sehat, Disiplin, Dan Produktif Di Tengah Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Sidoarjo

1.Surat Keputusan Bupati Nomor: 188/302/438.1.1.3/2020

Surat Keputusan Bupati Nomor: 188/307/438.1.1.3/2020

ALOKASI ANGGARAN HASIL REFOCUSING

1

- Penyesuaian Pendapatan Daerah dari SEMULA Rp 4.536.589.395.000,00 menjadi Rp. 3.829.368.680.495,00 (-15,59%)

2

- Penyesuaian Belanja Daerah dari SEMULA Rp 5.365.589.395.000,00 menjadi Rp 4.658.368.680.495,00 (-13,18 %)

3

- Alokasi Tambahan Anggaran pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT) hasil Refocusing adalah sebesar Rp. 278.038.556.913,00

4

- Tambahan anggaran pada POS BTT digunakan untuk Belanja Bidang Kesehatan, Penyediaan Jaring Pengamanan Sosial dan Penanganan Dampak Ekonomi



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS SERIAL**

Kategori	Indikator Kinerja	Target
Manajemen dan Pemertayaan Rantai Pasokan (MPPR)	Realisasi pemertayaan MPPR di setiap provinsi	1,00 %

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS SERIAL**

Kategori	Indikator Kinerja	Target
Manajemen dan Pemertayaan Rantai Pasokan (MPPR)	Realisasi pemertayaan MPPR di setiap provinsi	1,00 %
Program	Program Pemertayaan Rantai Pasokan (MPPR) di setiap provinsi	100%
	Program Pemertayaan Rantai Pasokan (MPPR) di setiap provinsi	100%

Penyesuaian Target Kinerja sebagai dampak refocusing anggaran belanja untuk penanganan covid-19



INOVASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN COVID-19

Pembuatan Aplikasi Presensi Online Berbasis Web dan Android bagi ASN dan Non ASN dilingkungan Pemkab Sidoarjo yang didukung fasilitasi absen secara FWA

Pembuatan Aplikasi Surat Online dengan tanda tangan elektronik yang terintegrasi dengan Absensi Online (**Aplikasi e-Buddy**)

Pembuatan Aplikasi Video Conference dalam rangka menunjang kegiatan Rapat dan meminimisir pertemuan Tatap Muka

Pembuatan **Aplikasi SIPraja** dalam menunjang Administrasi Kependudukan sehingga masyarakat bisa Cetak Mandiri Dokumen Kependudukan

Kolaborasi **Program Kampung Tangguh** dengan penerapan Protokol Kesehatan yang ketat

Kolaborasi dalam pelaksanaan checkpoint PSBB

Pelaksanaan PSBB sampai level desa/ kelurahan

Pembentukan Tim Gugus Tugas PSBB Covid-19



Persebaran COVID-19 Sidoarjo

10 September 2020

Kumulatif
Terkonfirmasi
positif COVID-19

5616 (+43)

Terkonfirmasi
positif COVID-19
Dalam Perawatan

843

Terkonfirmasi
positif COVID-19
Sembuh

4391 (+45)

Terkonfirmasi
positif COVID-19
meninggal

382 (+8)

Kumulatif
PDP

1385 (+17)

PDP Dalam
Pengawasan

241

PDP Sembuh

1068 (+231)

PDP
meninggal

76

Kumulatif
ODP

1962 (+5)

ODP
dipantau

184

ODP Selesai
dipantau

1778

Info lebih lanjut kunjungi
covid19.sidoarjokab.go.id

Sumber :
Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
DINAS KESEHATAN

Tabel Sebaran Covid-19

Kamis, 10 September 2020

NAMA KECAMATAN	ODP	SMP	PDP	PDPs	PDPm	CONFIRM	SEMBUH	MENINGGAL
SIDOARJO	849 +3	713	183	154 +27	3	778 +5	647 +9	47 +1
BUDURAN	135	136	49	36 +7	4	323 +4	249 +5	19 +1
CANDI	62	62	89 +1	64 +11	5	401 +5	283 +1	27
GEDANGAN	71	71	108 +4	84 +10	8	406 +2	329 +11	20
TANGGULANGIN	43 +2	35	38	27 +6	11	230 +1	181 +2	14
PORONG	22	22	40	28 +17	2	153 +1	119 +1	8
JABON	37	37	35	34 +5		88	60 +1	12 +1
TAMAN	88	87	231 +2	191 +30	7	751 +5	600 +9	46
KREMBUNG	108	88	22	15 +4	1	127 +1	98	10
WONOAYU	27	27	39 +2	28 +7	3	162 +2	121 +1	9
TULANGAN	85	85	59 +1	47 +9		279 +1	230 +2	14
KRIAN	60	59	105 +2	64 +31		274 +2	193 +2	29
PRAMBON	77	60	29	18 +13	6	124 +2	92	9
SUKODONO	46	46	71 +1	44 +8	12	258 +1	186 +1	21
SEDATI	30	30	42 +1	33 +4	1	261 +2	220	19 +1
WARU	83	83	158	135 +30	6	776 +6	625	54 +2
BALONGBENDO	28	27	53 +2	40 +9	5	150 +1	108	17 +2
TARIK	28	28	23 +1	16 +3	2	72	50	7
LUAR WILAYAH	6	5	11	10				
ALAMAT TIDAK DITEMUKAN	77	77						
TOTAL	1962 +5	1778	1385 +17	1068 +231	76	5616 +43	4391 +45	382 +8

dinkes_sidoarjo

covid19.sidoarjokab.go.id



TERIMAKASIH

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO